



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo adalah Provinsi Gorontalo
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip yang dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
6. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
7. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
8. Publik adalah warga Negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses arsip dinamis.
9. Pencitpa Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
10. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
11. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya.
12. Klasifikasi keamanan arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
13. Klasifikasi akses arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.

14. Pengamanan arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
15. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
16. Biasa/terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
17. Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.
18. Sangat Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
19. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.
20. Penggunaan arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
21. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan arsip dan berasal dari lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

22. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
23. Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.
24. Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan/ atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Pasal 2

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dimaksudkan untuk:
 - a. mendorong unit-unit kerja agar memberkaskan arsip dinamis unit kerjanya secara tertib yang disertai dengan daftar arsip aktifnya;
 - b. memberikan petunjuk kepada unit-unit kerja agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan;
 - c. melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan realibilitas arsip dapat tetap terjaga; dan
 - d. melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.
- (2) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo bertujuan untuk:
 - a. menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
 - b. menyediakan layanan informasi arsip dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman;

- c. tersedianya informasi Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik sesuai dengan lampiran klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
- d. terjaminnya keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan; dan
- e. terciptanya kenyamanan bekerja bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pasal 3

Ruang lingkup Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo mencakup:

- a. klasifikasi keamanan arsip, memuat informasi biasa/ umum/ terbuka, terbatas, rahasia dan sangat rahasia;
- b. pengamanan arsip, memuat pengamanan ruang simpan, penentuan pengelola arsip, serta daftar informasi terbatas, rahasia dan sangat rahasia; serta
- c. klasifikasi dan pengaturan akses arsip, memuat pengguna internal dan pengguna eksternal.

Pasal 4

- (1) Asas klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
- (2) Asas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.
- (3) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyusunan dan penerapan pedoman serta standar operasional prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

Pasal 5

Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. arsip yang tercipta di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat diklasifikasikan menjadi informasi biasa, terbatas, rahasia dan sangat rahasia;
- b. keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
- c. keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya;
- d. setiap pegawai Pemerintah Provinsi Gorontalo hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya; dan
- e. publik dapat mengakses informasi Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Pasal 6

- (1) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo menggunakan sarana perangkat keras (*hardware*) dan Perangkat Lunak (*Software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa *filing cabinet*/ rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/ terbuka dan terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk arsip rahasia dan sangat rahasia;
 - b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (3) Perangkat lunak (*Software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.

Pasal 7

- (1) Pejabat Fungsional Arsiparis dan/ atau pengelola arsip yang bertugas mengelola arsip harus dipilih pegawai yang profesional baik dalam substansi kearsipan maupun dalam dedikasi dan integritas.
- (2) Pejabat Fungsional Arsiparis dan/ atau pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Gorontalo.

Pasal 8

Arsip dinamis Pemerintah Provinsi Gorontalo terbagi menjadi tiga (3) kategori yang meliputi:

- a. biasa/ umum/ terbuka;
- b. terbatas; dan
- c. rahasia

Pasal 9

Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang termasuk ke dalam kategori arsip biasa/ umum/ terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo antara lain:

- a. arsip dinamis dari lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo meliputi Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Biro Hukum dan Organisasi, Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi, Biro Pengadaan, Biro Umum, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- b. arsip dinamis dari lingkungan Dinas Provinsi Gorontalo meliputi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga; Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Koperasi; Usaha, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran; Dinas

Pangan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan;

- c. arsip dinamis dari lingkungan Badan Provinsi Gorontalo meliputi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Badan Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Keuangan, Badan Kepegawaian, Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Badan Penghubung;
- d. arsip dinamis dari lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, Inspektorat Provinsi Gorontalo, dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo;

Pasal 10

Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang termasuk ke dalam kategori arsip terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja unit teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang meliputi:

- a. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Kepegawaian seperti *personal file*, hasil pertimbangan BAPERJAKAT, rekam medis pegawai;
- b. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Perlengkapan seperti dokumen pengadaan barang Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- c. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Inspektorat seperti Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal, Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Independen;
- d. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran di setiap unit kerja; dan
- e. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Arsip seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga.

Pasal 11

Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang termasuk ke dalam kategori arsip rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo yang meliputi:

- a. arsip dinamis yang tercipta dari Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum seperti kasus/ sengketa hukum, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan *personal file*;
- b. arsip dinamis yang tercipta dari Biro Umum seperti sertifikat tanah, rancang bangun instalasi telepon, instalasi listrik, daftar arsip vital, dan lain-lain; serta
- c. Arsip dinamis yang tercipta dari Pusat Jasa Kearsipan seperti strategi pemasaran.

Pasal 12

- (1) Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV), kunci pengamanan ruangan, dan media simpan arsip.
- (2) Pengamanan arsip kategori umum disimpan pada rak besi, arsip kategori terbatas di simpan pada *filing cabinet*, dan arsip kategori rahasia di simpan pada lemari besi.

Pasal 13

- (1) Penentuan Pengelola Arsip meliputi Pejabat Fungsional Arsiparis di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo dan Pengelola Arsip Aktif (PAA) di *Central File* Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- (2) Arsiparis sebagai pengelola arsip inaktif berperan dalam pengamanan arsip di *Records Center* (Pusat Arsip) dalam menetapkan hak akses arsip.
- (3) Arsiparis dan/ atau Pengelola Arsip Aktif (PAA) mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelola arsip di *central file*.

Pasal 14

- (1) Pengamanan informasi arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo meliputi Penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia.
- (2) Tujuan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di *Records Centre* dan *Central File*.

Pasal 15

Tabel klasifikasi keamanan dan pengamanan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Desember 2019
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

SYUKRI J. BOTUTIHE

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 69

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 69 TAHUN 2019

TANGGAL : 23 Desember 2019

TENTANG : SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PROVINSI GORONTALO

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
I		PEMERINTAHAN DAERAH				
1	PD	KEBIJAKAN				
2	00	Kebijakan ,Pemerintahan , pemberdayaan masyarakat dan desa, Polisi Pamong Paraja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran, kependudukan dan pencatatan sipil .	Terbatas	JPT,Administortor,Pengawas Pelaksana,JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bagian-Bagian
	00.01	a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan		Q		
	00.01.1	b. Penyiapan Kebijakan				
	00.01.2	c. Perumusan Kebijakan				
	00.01.3	d. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)				
	00.01.4	e. MOU				
	00.01.5					
	01	PEMERINTAHAN				
	01.01	a. Dekonsentrasi dan Kerjasama				
	01.01.1	1) Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Biro Pemkesra
	01.01.2	2) Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Biro Pemkesra
	01.02	b. Wilayah Administrasi dan Perbatasan				
	01.02.1	1) Toponimi dan Data Wilayah a) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan toponimi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Biro Pemkesra

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembakuan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Biro Pemkesra
		c) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi perubahan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Biro Pemkesra
		d) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Biro Pemkesra
		e) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penghitungan luas wilayah	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Biro Pemkesra
	01.02.2	2) Batas Antar Daerah Wilayah				
		a) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penetapan batas antar daerah	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Biro Pemkesra
		b) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelesaian sengketa batas antar daerah	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Biro Pemkesra
	01.03	c Kesejahteraan Rakyat dan Ekonomi				
	01.03.1	1) Keagamaan adat dan budaya				
		a) Pelayanan penyelenggaraan ibadah haji yang belum memiliki embarkasi haji antara (EHA) Provinsi Gorontalo	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Biro Pemkesra
		b) Pelayanan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Biro Pemkesra
		c) Pembinaan dan Pelayanan Agama	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Biro Pemkesra
		d) Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Quran (STQ)	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Biro Pemkesra
		e) Pelaksanaan kegiatan adat dan budaya	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Biro Pemkesra
	01.03.2	2) Kesejahteraan Rakyat				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	01.03.3	a) Koordinasi, Sinkronisasi dan fasilitasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan penyusunan rencana program b) Koordinasi, Sinkronisasi dan fasilitasi kebijakan Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan c) Koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi kebijakan sosial dan ketahanan keluarga 3) Ekonomi a) Mengkoordinasikan b) Penyusunan bahan koordinasi c) Melakukan pengendalian dan pemantauan	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka	UMUM UMUM UMUM UMUM UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Biro Pemkesra Biro Pemkesra Biro Pemkesra Biro Pemkesra Biro Pemkesra Biro Pemkesra
3	PP	POLISI PAMONG PRAJA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN KEBAKARAN				
	00 00.01 00.01.1 00.01.2	a. Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja 1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata operasional polisi pamong praia a) standardisasi sarana prasarana polisi pamong praja (1) fasilitasi - data pengajuan DAK (2) koordinasi (3) pembinaan dan pengawasan (4) monitoring dan evaluasi 2) Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyusunan program peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praia	Terbatas Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana,JFA JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana,JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Sekretariat Sekretariat

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	00.01.3	3) Penegakan Peraturan daerah, Ketertiban Umum dan Ketertentraman Masyarakat a) Koordinasi b) Pengendalian c) Penanganan Pengaduan d) Pembinaan dan Pengawasan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Tibumtram
	00.01.4	4) Operasi dan Pengendalian a) Fasilitas dan Koordinasi b) Pengawasan Pejabat c) Patroli Rutin dan terpadu d) Penanganan Pengaduan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Tibumtram
	00.01.5	5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil a) fasilitas, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan operasional penyidik pegawai negeri sipil b) fasilitas, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan dan evaluasi administrasi aparaturnya penyidik pegawai negeri sipil	Terbatas	JPT, Administrator, Pengawas Pelaksana..JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	PPNS
	00.01.6	6) Ketertiban Umum dan Ketentraman a) Pembinaan Pengamanan b) Pengamanan Personel dan bahan keterangan c) Pengamanan materiil d) Pengamanan kegiatan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Tibumtram
	00.01.7	7) Perlindungan Masyarakat	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Linmas

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		a) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan masyarakat b) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan aparatur dan kelembagaan perlindungan masyarakat 8) Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran a) evaluasi peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Damkar
	01 01.01	b Bina potensi masyarakat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 1) Identifikasi Potensi Bencana a) evaluasi pelaksanaan pencegahan bencana dan mitigasi bencana	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Linmas
	01.02	2) Organisasi Sistem dan Prosedur a) pengembangan kerjasama kelembagaan serta penanggulangan bencana (1) fasilitasi - database daerah rawan bencana (2) koordinasi (3) fasilitasi serta koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Linmas
	01.03	3) Sarana dan Prasarana a) Evaluasi standarisasi aplikasi peralatan penyelenggaraan penanggulangan bencana b) Evaluasi pengembangan informasi dan teknologi penyelenggaraan penanggulangan bencana				
	01.04	4) Pelatihan mobilisasi				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		a) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan dasar dan mobilisasi b) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan dasar dan mobilisasi				
4	PMD	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	00 00.01	a. Pemerintahan Desa dan Kelurahan 1) Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat Desa (PPMD)
	00.01.1 00.01.2 00.02	a) pelaksanaan pengembangan desa b) pelaksanaan pengembangan kelurahan 2) Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Rahasia	JPT ke atas	Mengakibatkan terganggunya Penyelenggaraan Negara/ketertiban umum	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	00.02.1 00.02.2 00.03	a) pembinaan administrasi pemerintahan desa b) pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan 3) Pengembangan Kapasitas Desa	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan
	00.03.1 00.03.2	a) pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan b) pelaksanaan pengembangan kapasitas badan permusyawaratan desa dan masyarakat				
	01 01.01	b. Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat 1) Pendataan Potensi Masyarakat				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	01.01.1	a) inventarisasi potensi masyarakat (1) profil desa b) evaluasi perkembangan masyarakat	Terbuka Terbuka Terbuka	UMUM UMUM UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat Desa (PPMD) Bidang Bina Pemerintahan Desa Bidang Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat Desa (PPMD)
	01.02 01.02.1	2) Ekonomi perdesaan dan masyarakat tertinggal a) Ekonomi perdesaan (1) identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan (2) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan (3) Monitoring dan evaluasi	Terbatas Terbatas Terbuka	Pengawas, pejabat administrator, Pejabat Tinggi Pratama Pengawas, pejabat administrator, Pejabat Tinggi Pratama UMUM	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat Desa (PPMD) Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan
	01.02.2	b) Masyarakat tertinggal (1) identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat daerah tertinggal	Terbatas	Pengawas, pejabat administrator, Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD	Bidang Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat Desa (PPMD)

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		(2) fasilitasi pengembangan masyarakat daerah tertinggal	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan
		(3) Monitoring dan evaluasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan
	02	c. Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan				
	02.01	1) Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan	Terbatas	Pengawas, pejabat administrator, Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD	Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan
	02.02	a) pembinaan pengelolaan konservasi kawasan b) pelaksanaan rehabilitasi lingkungan 2) Fasilitasi Pemanfaatan lahan dan Pesisir Perdesaan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan
	02.02	a) pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumberdava lahan perdesaan				
	02.03	b) pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumberdava pesisir perdesaan 3) Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan
	02.04	a) pembinaan pengelolaan prasarana air dan sanitasi lingkungan b) pembinaan pengelolaan prasarana dan sarana pemukiman 4) Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan
		a) pelaksanaan pemetaan kebutuhan teknologi perdesaan b) pelaksanaan pengkajian pemanfaatan teknologi perdesaan				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	02.05	5) Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan a) pelaksanaan pemasarakatan teknologi perdesaan b) pelaksanaan kerjasama pengelolaan teknologi perdesaan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan
5	DUKCA PIL	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	00	a. Pendaftaran Penduduk	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	00.01	1) Monitoring pelaksanaan program pendaftaran penduduk				
	00.02	2) Evaluasi pelaksanaan program pendaftaran penduduk				
	00.03	3) Pelaksanaan dokumentasi kebijakan pendaftaran penduduk				
	01	b. Pencatatan Sipil				
	01.01	1) Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	01.01.1	a) penyusunan program dan kegiatan direktorat pencatatan sipil				
	01.01.2	b) monitoring pelaksanaan program pencatatan sipil				
	01.01.3	c) evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil				
	01.01.4	d) pelaksanaan dokumentasi kebijakan pencatatan sipil				
	02	c. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
	02.01	1) Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan	Rahasia	JPT ke atas	Mengakibatkan terganggunya Penyelenggaraan Negara/ketertiban umum	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	02.01.1	a) pengelolaan data administrasi kependudukan				
	02.01.2	b) pemeliharaan database administrasi kependudukan				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	02.01.3 02.01.4 02.02	c) pengembangan database administrasi kependudukan d) pelayanan pengelolaan data administrasi kependudukan 2) Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	02.02.1 02.02.2 02.02.3 02.03	a) penyajian informasi administrasi kependudukan b) pelaksanaan pelayanan informasi melalui media elektronik c) pelaksanaan layanan informasi melalui media cetak 3) Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	02.03.1 02.03.2 02.03.3 02.03.4	a) pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur sekolah dan melalui jalur luar sekolah b) kebijakan kependudukan dan pengembangan wawasan kependudukan c) pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengembangan wawasan kependudukan c) pelaksanaan dokumentasi pelayanan informasi kependudukan				
II	KA	KEARSIPAN				
1	00 00.01	Kebijakan Kebijakan tentang Pembinaan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip.	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang-Bidang
	00.01.1 00.01.2 00.01.3 00.01.4	a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan b. Penyiapan kebijakan c. Perumusan kebijakan d. Penetapan NSPK				
2	01 01.01	Pembinaan Kearsipan a Akreditasi Kearsipan: Lembaga Kearsipan, Unit Kearsipan, Lembaga				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	01.01.1	1) Proses Permohonan Akreditasi	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kearsipan
	01.01.2	2) Penetapan Sertifikasi Akreditasi	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kearsipan
	01.02	b Sertifikasi Arsiparis				
	01.02.1	1) Proses Sertifikasi Arsiparis	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kearsipan
	01.02.2	2) Berkas Penetapan Sertifikasi Arsiparis	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kearsipan
	01.02.3	3) Data Base Sertifikasi Arsiparis	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kearsipan
	01.03	c Bina Arsiparis				
	01.03.1	1) Bimbingan Konsultasi Arsiparis	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kearsipan
	01.03.2	2) Penilaian Arsiparis	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kearsipan
	01.03.3	3) Pemilihan Arsiparis Teladan -Penyelenggaraan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kearsipan
		-Berkas Penetapan Arsiparis Teladan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kearsipan
	01.03.4	4) Data Base Arsiparis	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kearsipan
	01.04	d Bimbingan dan Konsultasi	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kearsipan
	01.04.1	1) Penerapan Sistem (Klasifikasi Arsip, Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Akses Keamanan)				
	01.04.2	2) Penggunaan Sarana dan Prasarana Kearsipan				
	01.04.3	3) Unit Kearsipan				
	01.04.4	4) Sumberdaya Manusia				
	01.05	e Supervisi dan Evaluasi				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	01.05.1	1) Perencanaan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kearsipan
	01.05.2	2) Pelaksanaan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kearsipan
	01.05.3	3) Laporan hasil supervisi dan Evaluasi	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kearsipan
	01.06	f Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kearsipan
	01.07	g Fasilitasi Kearsipan				
	01.07.1	1) SDM Kearsipan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kearsipan
	01.07.2	2) Prasarana dan Sarana	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kearsipan
	01.08	h Lembaga/Unit Kearsipan Teladan				
	01.08.1	1) Penyelenggaraan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kearsipan
	01.08.2	2) Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kearsipan
	01.09	i Jadwal Retensi Arsip				
		1) Pengusulan dan Persetujuan/Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kearsipan
		2) Data Base Persetujuan/Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kearsipan
3	02	Pengelolaan Arsip				
	02.01	a Pengelolaan Arsip Dinamis				
	02.01.1	1) Penciptaan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kearsipan
		a) Pencatatan - Buku Agenda - Kartu Kendali				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	02.01.2	- Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi - b)Pendistribusian	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kearsipan
		2) Penggunaan				
		a) Pengklasifikasian Pengamanan dan Akses Arsip	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kearsipan
		b) Peminjaman				
	02.01.3	3) Pemeliharaan				
		a)Pemberkasan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kearsipan
		- Daftar arsip aktif (daftar berkas dan isi berkas) b) Penataan Arsip Inaktif	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kearsipan
		- Pengaturan fisik - Pengolahan informasi arsip - Penyusunan daftar arsip inaktif				
		c) Penyimpanan arsip				
		- Skema penyimpanan arsip aktif dan in aktif	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kearsipan
		- Pengamanan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kearsipan
		d) Alih Media	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kearsipan
		- Kebijakan alih media - Autentikasi - Berita acara - Daftar arsip yang alih mediakan				
		e) Program Arsip vital	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kearsipan
		- Identifikasi - Pelindungan dan pengamanan				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	02.01.4	- Penyelamatan dan pemulihan 4) Autentikasi Arsip Dinamis Pembuktian Autentisitas Pendapat tenaga ahli Pengujian Penetapan autentisitas arsip statis/surat pernyataan Pencipta Arsip	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kearsipan
	02.01.5	5) Penyusutan a) Pemindahan Arsip Inaktif - Berita acara Pemindahan - Daftar arsip yang di pindahkan b) Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna - Panitia penilai - Penilaian panitia penilai - Permintaan persetujuan (Kepala ANRI, Kepala Lembaga Kearsipan) - Penetapan arsip yang dimusnahkan - Berita Acara Pemusnahan Arsip - Daftar arsip yang dimusnahkan c) Penyerahan arsip statis - Pembentukan Panitia Penilai - Notulen Rapat Panitia - Surat pertimbangan Panitia Penilai - Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan - Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan dari pencipta arsip - Keputusan Penetapan Penyerahan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kearsipan
			Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kearsipan
			Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kearsipan

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	02.01.6	- Berita Acara Penyerahan Arsip - Daftar arsip yang diserahkan 6) Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis a) Data Base Pengelolaan Arsip Aktif b) Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif	Terbatas Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kearsipan Bidang Kearsipan
	02.02 02.02.1	b Pengelolaan Arsip Statis 1) Akuisisi a)Monitoring fisik dan daftar b)Verifikasi terhadap daftar arsip c) Menetapkan status arsip statis d) Persetujuan untuk Penyerahan e) Penetapan arsip yang diserahkan f) Berita Acara Penyerahan Arsip g) Daftar arsip yang diserahkan	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kearsipan Bidang Kearsipan Bidang Kearsipan Bidang Kearsipan Bidang Kearsipan Bidang Kearsipan Bidang Kearsipan
	02.02.2	2) Seiarah Lisan a) Administrasi Pelaksanaan Sejarah Lisan b) Hasil Wawancara Sejarah Lisan -Berita Acara wawancara Sejarah Lisan -Laporan Kegiatan -Hasil Wawancara (Kaset atau CD) dan transkrip	Terbatas Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kearsipan Bidang Kearsipan

[illegible]

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
III	PUS	PERPUSTAKAAN				
1	00	Kebijakan Perpustakaan Meliputi Kebijakan Di Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Dan Jasa Informasi Dan Sumber Daya Perpustakaan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang-Bidang
	00.01	a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan				
	00.02	b. Penyiapan kebijakan				
	00.03	c. Perumusan dan penyusunan bahan				
	00.04	d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan				
	00.05	e. Penetapan dalam bentuk NSPK meliputi Kajian Kebutuhan Bahan				
2	01	PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN JASA INFORMASI				
	01.01	a. Deposit Bahan Pustaka				
	01.01.1	1) Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perpustakaan
	01.01.2	2) Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perpustakaan
	01.01.3	3) Terbitan Regional	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perpustakaan
	01.01.4	4) Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perpustakaan
	01.01.5	5) Bibliografi dan Katalog	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perpustakaan
		a) Bibliografi Daerah (BD)				
		b) Katalog Induk Daerah (KID)				
		c) Katalog Dalam Terbitan (KDT)				
	01.02	b. Pengembangan Koleksi				
	01.02.1	1) Akuisisi				
		a) Pembelian	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perpustakaan
		b) Hibah	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perpustakaan

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
3	01.03.6	c) Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perpustakaan
		6) Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan				
		a) Pengembangan situs web	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perpustakaan
		b) Pengembangan kemas ulang informasi multimedia	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perpustakaan
		c) Pengembangan program aplikasi perpustakaan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perpustakaan
		d) Pengembangan pangkalan data kepastakaan digital	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perpustakaan
	01.03.7	7) Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perpustakaan
	01.04	d. Preservasi Bahan Pustaka				
	01.04.1	1) Konservasi	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perpustakaan
		a) Perawatan Bahan Perpustakaan b) Perbaikan Bahan Perpustakaan c) Penjilidan Bahan Perpustakaan				
	01.04.2	2) Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perpustakaan
	01.04.3	3) Transformasi Digital	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perpustakaan
	01.04.4	4) Kurasi Digital	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perpustakaan
3	02	SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN				
	02.01	a Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca				
	02.01.1	1) Pengembangan Perpustakaan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perpustakaan

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	02.01.2	a) Perpustakaan Umum b) Perpustakaan Khusus c) Perpustakaan Sekolah d) Perpustakaan Perguruan Tinggi 2) Akreditasi Perpustakaan a) Permintaan akreditasi b) Pemberian akreditasi	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perpustakaan
	02.01.3	3) Pangkalan Data Perpustakaan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perpustakaan
	02.01.4	a) Nomor Pokok Perpustakaan b) Perpustakaan Berbasis Wilayah 4) Pemasyarakatan Minat Baca	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perpustakaan
	02.01.5	5) Organisasi Perpustakaan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perpustakaan
	02.02	a) Forum Perpustakaan Umum b) Forum Perpustakaan Khusus c) Forum Perpustakaan Sekolah d) Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi e) Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca f) Organisasi Perpustakaan Lainnya				
	02.02.1	b. Pengembangan Pustakawan 1) Sertifikasi Tenaga Perpustakaan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perpustakaan
	02.02.2	2) Pembinaan Tenaga Perpustakaan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perpustakaan
	02.02.3	3) Penilaian Jabatan Fungsional Pustakawan a) Tim Penilai Instnasi/Perpustakaan Nasional	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perpustakaan

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	02.02.4	4) Pemasyarakatan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perpustakaan
	02.02.5	5) Evaluasi Tenaga Perpustakaan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perpustakaan
	02.02.6	6) Pangkalan data Tenaga Perpustakaan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perpustakaan
IV	P	PERTANIAN				
1	00	Kebijakan Kebijakan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perkebunan, Hortikultura. Sarana Prasarana Pertanian. Tanaman Pangan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Peternakan
	00.01	a Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan				
	00.02	b Penyiapan Bahan				
	00.03	c. Perumusan Kebiiakan				
	00.04	d. Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebiiakan				
	00.05	e. Penetapan Berbentuuk NSPK				
2	01	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				
	01.01	a Perbibitan Ternak				
	01.01.1	1) Produksi Bibit Ternak Ruminansia	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Peternakan
		-Produksi Bibit Ternak Ruminansia Besar				
		-Produksi Bibit Ternak Ruminansia Kecil				
	01.01.2	2) Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Peternakan
		-Produksi Bibit Ternak Unggas				
		-Produksi Bibit Aneka Ternak				
	01.01.3	3) Mutu Bibit ternak	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Peternakan
		-Pengawasan Mutu Bibit Ternak				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	01.02	b Pakan Ternak				
	01.02.1	1) Bahan Pakan -Bahan Pakan Asal Hewan -Bahan Pakan Asal Tumbuhan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Peternakan
	01.02.2	2) Pakan Hijauan -Pendataan Jenis Hijauan/Hasil Sampingan Pertanian/Hasil Ikutan Industri -Budidaya Pakan Hijauan -Kawasan Penggembalaan dan Integrasi Ternak	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Peternakan
	01.02.3	3) Pakan Olahan -Produksi Pakan Olahan -Pengolahan Pangan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Peternakan
	01.02.4	4) Mutu Pakan -Pengawasan Pakan -Pengujian Mutu Pakan -Penilaian prosedur sertifikasi/pelabelan ulang bahan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Peternakan
	01.02.5	5) Teknologi Pakan -Bimbingan Teknis Pengawasan Mutu Pakan Ternak -Penerapan Teknologi Pakan Ternak				
	01.02.6	6) Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran -Rekomendasi Pencabutan peredaran Bahan Pakan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Peternakan
	01.03	c Budidaya Ternak				
	01.03.1	1) Ternak Potong -Ternak Sapi Potong	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Peternakan

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	01.03.2	-Ternak Kambing Potong 2) Ternak Unggas dan Aneka Ternak	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Peternakan
	01.03.3	-Ternak Unggas -Aneka Ternak 3) Usaha dan Kelembagaan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Peternakan
	01.03.4	-Pendampingan petugas lapangan peternakan -Petugas lapangan pengawalan kelompok ternak pemerintah 4) Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran -Rekomendasi Pencabutan Peredaran Bahan Pakan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Peternakan
	01.04 d	Kesehatan Hewan				
	01.04.1	1) Pengamatan penyakit hewan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Peternakan
	01.04.2	2) Penvidikan Penyakit Hewan				
	01.04.3	3) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan -Pencegahan Penyakit Hewan -Pemberantasan Penyakit Hewan -Rekomendasi MBM	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Peternakan
	01.04.4	4) Perlindungan Hewan -Analisis Risiko Penyakit Eksotik -Kesiagaan Darurat Penyakit Hewan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Peternakan
	01.04.5	5) Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan -Kelembagaan Kesehatan Hewan (URC) -Sumber Daya Kesehatan Hewan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Peternakan

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	01.04.6	-Laporan Tenaga Harian Lepas (THL) -Proposal Poskeswan 6) Pengawasan Obat Hewan -Mutu Obat Hewan -Peredaran Obat Hewan -Pendaftaran Obat Hewan -Rekomendasi Obat Hewan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Peternakan
	01.05	e Pemasaran Hasil				
	01.05.1	1) Pascapanen -Teknologi Pascapanen -Sarana Pascapanen	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Peternakan
	01.05.2	2) Higien Sanitasi -Penerapan Higiene Sanitasi -Inspeksi Higiene Sanitasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Peternakan
	01.05.3	3) Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan -Pengawasan Sanitary -Pengawasan Keamanan Produk Hewan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Peternakan
	01.05.4	4) Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan -Zoonosis -Kesejahteraan Hewan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Peternakan
	01.05.5	5) Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan -Pengujian Produk Hewan;	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Peternakan

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
3	01.05.6	6) Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Peternakan
	02	PERKEBUNAN				
	02.01	a Tanaman Semusim				
	02.01.1	1) Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya -Identifikasi Sumber Daya Tanaman Semusim -Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perkebunan
	02.01.2	2) Perbenihan -Penyiapan Perbenihan Tanaman Semusim -Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Semusim	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perkebunan
	02.01.3	3) Budidaya -Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim -Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perkebunan
	02.01.4	4) Pemberdayaan dan Kelembagaan -Pemberdayaan Tanaman Semusim -Kelembagaan Tanaman Semusim	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perkebunan
	02.02	b Tanaman Rempah & Penyegetar				
	02.02.1	1) Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya -Identifikasi Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegetar -Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegetar	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perkebunan
	02.02.2	2) Perbenihan -Penyiapan Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegetar	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perkebunan

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	02.02.3	3) -Bimbingan Peredaran Tanaman Rempah & Penvegar Budidaya -Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar -Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi delaksanaan tugas OPD	Bidang Perkebunan
	02.02.4	4) Pemberdayaan dan Kelembagaan -Pemberdayaan Tanaman Rempah & Penvegar -Kelembagaan Tanaman Rempah & Penvegar	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi delaksanaan tugas OPD	Bidang Perkebunan
	02.03 02.03.1	c Tanaman Tahunan dan Penyegar 1) Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya -Identifikasi Sumber Daya Tanaman Tahunan dan penyegar -Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Tahunan dan Penvegar	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi delaksanaan tugas OPD	Bidang Perkebunan
	02.03.2	2) Perbenihan -Penyiapan Perbenihan Tanaman Tahunan dan Penvegar -Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi delaksanaan tugas OPD	Bidang Perkebunan
	02.03.3	3) Budidaya -Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan dan Penvegar -Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan dan Penvegar	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi delaksanaan tugas OPD	Bidang Perkebunan

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	02.03.4	4) Pemberdayaan dan Kelembagaan -Pemberdavaan Tanaman Tahunan dan Penvegar -Kelembagaan Tanaman Tahunan dan Penvegar	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perkebunan
	02.06	d Perlindungan Perkebunan				
	02.06.1	1) Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim - Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim -Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perkebunan
	02.06.2	2) Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penvegar -Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penvegar	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perkebunan
	02.06.3	3) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penvegar				
	02.06.4	4) Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan -Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan -Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perkebunan
	02.06.5	5) Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran -Dampak Perubahan Iklim -Pencegahan Kebakaran	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perkebunan
	02.07	e Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	02.07.1	1) Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar -Teknologi Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar -Penerapan Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perkebunan
	02.07.2	2) Pascapanen Tanaman Tahunan dan Penyegar -Teknologi Pascapanen Tanaman Tahunan dan Penyegar -Penerapan Pascapanen Tanaman Tahunan dan Penyegar	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perkebunan
	02.07.3	3) Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan -Bimbingan Usaha Perkebunan -Perkebunan Berkelanjutan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perkebunan
	02.07.4	4) Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik -Gangguan Usaha Perkebunan -Penanganan Konflik	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perkebunan
02.08	f.	Perbenihan Tanaman Perkebunan				
	02.08.1	1) Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber daya - Identifikasi Sumber Daya Tanaman Perkebunan - Penetapan Sumber Daya Tanaman Perkebunan - Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Perkebunan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perkebunan
	02.08.2	2) Perbenihan - Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan - Pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perkebunan
	02.08.3	3) Budidaya - Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Perkebunan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perkebunan

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
4	02.08.4	- Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Perkebunan 4) Pemberdayaan dan Kelembagaan - Pemberdayaan Tanaman Perkebunan - Kelembagaan Tanaman Perkebunan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perkebunan
	03 03.01 03.01.1	HORTIKULTURA a Sayuran dan Biofarmaka 1) Pengembangan Komoditi sayuran - Benih Cabe Rawit - Benih Bawang Merah - Aneka Benih Sayuran	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Hortikultura
	03.01.2	2) Pengembang Komoditi Biofarmaka - Bibit Jahe	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Hortikultura
	03.02 03.02.1	b Buah-buahan dan Tanaman Hias 1) Pengembangan Komoditi Buah-Buahan - Bibit Durian - Bibit Duku - Bibit mangga - Bibit Jeruk	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Hortikultura
	03.02.2	2) Pengembangan Komoditi Tanaman Hias - Bibit Anggrek - Bibit Non Anggrek.	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Hortikultura
	03.02.3	c Budidaya dan Pascapanen Hortikultura -Laporan kegiatan Budidaya Sayuran dan Biofarmaka	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Hortikultura

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
5	04 04.01 04.01.1	-Laporan kegiatan Budidaya Buah-buahan dan Tanaman Hias -Laporan kegiatan Pascapanen Tanaman Sayuran dan Biofarmaka -Laporan kegiatan Pascapanen Tanaman Buah-buahan dan Tanaman Hias PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN a Perluasan dan Pengelolaan Lahan 1) Basis Data Lahan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	04.01.2	-Identifikasi Lahan -Analisis dan Penyajian Data Lahan 2) Pengendalian Lahan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	04.01.3	-Identifikasi dan Analisis Lahan -Rekomendasi Teknis pengendalian lahan 3) Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	04.01.4	-Identifikasi dan Analisis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan. -Bimbingan Teknis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan. 4) Perluasan Kawasan Tanaman Pangan Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan tanaman pangan. Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan tanaman pangan.	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	04.01.5	5) Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		-Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan. -Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan.				
	04.02	b Pengelolaan Air Irigasi				
	04.02.1	1) Pengembangan Sumber Air -Air Permukaan -Air Tanah	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	04.02.2	2) Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air -Pengembangan Jaringan -Optimasi Air	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	04.02.3	3) Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup -Iklim -Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	04.02.4	4) Kelembagaan -Identifikasi Kelembagaan -Pengembangan Kelembagaan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	04.03	c Pembiayaan Pertanian				
	04.03.1	1) Pembiayaan Program -Data dan Informasi pembiayaan program -Pendampingan dan Bimbingan Teknis pembiayaan program	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	04.03.2	2) Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	04.03.3	-Pembiayaan Svariah -Keria Sama pembiayaan 3) Pembiayaan Agribisnis	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	04.03.4	-Materi dan Verifikasi pembiayaan agribisnis -Fasilitasi dan Pemantauan pembiayaan agribisnis 4) Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis -Kelembagaan Agribisnis -Pemberdavaan Agribisnis	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	04.04	d Pupuk Pestisida				
	04.04.1	1) Pupuk Organik dan Pembenah Tanah -Tanaman Pangan -Hortikultura dan Perkebunan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	04.04.2	2) Pupuk Anorganik -Tanaman Pangan -Hortikultura dan Perkebunan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	04.04.3	3) Pestisida -Pestisida Kimia -Pestisida Hayati	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	04.04.4	4) Pengawasan Pupuk dan Pestisida -Pengawasan Pupuk -Pengawasan Pestisida	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	04.05	e Alat dan Mesin Pertanian				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
6	04.05.1	1) Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian -Tanaman Pangan dan Hortikultura -Perkebunan dan Peternakan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	04.05.2	2) Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian -Tanaman Pangan dan Hortikultura -Perkebunan dan Peternakan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	04.05.3	3) Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian -Kelembagaan -Pelayanan				
	05	TANAMAN PANGAN	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	05.01	a Perbenihan Tanaman Pangan				
	05.01.1	1) Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih -Penilaian Varietas -Pengawasan Mutu Benih				
	05.01.2	2) Produksi Benih Serealia -Padi -Serealia Non Padi				
	05.01.3	3) Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi -Aneka Kacang -Aneka Umbi				
	05.01.4	4) Kelembagaan Benih -Kelembagaan Produksi -Kelembagaan Pengawasan				
	05.02	b Budidaya Serealia	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	05.02.1	1) Padi Irigasi dan Rawa -Padi Irigasi				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	05.02.2	-Padi Rawa 2) Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering -Padi Tadah Hujan -Padi Lahan Kering	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	05.02.3	3) Jagung -Intensifikasi Jagung -Pengembangan Jagung				
	05.02.4	4) Serealia Lain -Intensifikasi Serealia Lain -Pengembangan Serealia Lain				
	05.03 c	Budidaya Aneka Kacang dan Umbi				
	05.03.1	1) Kedelai Intensifikasi Kedelai Pengembangan Kedelai				
	05.03.2	2) Ubi Kayu -Intensifikasi Ubi Kayu -Pengembangan Ubi Kayu				
	05.03.3	3) Aneka Kacang -Intensifikasi Aneka Kacang -Pengembangan Aneka Kacang				
	05.03.4	4) Aneka Umbi -Intensifikasi Aneka Umbi -Pengembangan Aneka Umbi				
	05.04 d	Perlindungan Tanaman Pangan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	05.04.1	1) Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan -Monitoring dan Analisis Data organisme pengganggu tumbuhan				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	05.04.2	2) Dampak Perubahan Iklim -Adaptasi -Mitigasi dampak perubahan iklim				
	05.04.3	3) Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan -Identifikasi teknologi pengendalian. -Verifikasi teknologi pengendalian.				
	05.04.4	4) Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu -Pemasyarakatan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan. -Kelembagaan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan.				
	05.05	e Pascapanen Tanaman Pangan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	05.05.1	1) Padi -Teknologi pascapanen padi. -Sarana pascapanen padi. -Jagung dan Serealia Lain -Teknologi pascapanen jagung dan serealia lain. -Sarana pascapanen jagung dan serealia lain.				
	05.05.2	2) Kedelai dan Aneka Kacang -Teknologi pascapanen kedelai dan aneka kacang. -Sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang.				
	05.05.3	3) Aneka Umbi -Teknologi pascapanen aneka umbi. -Sarana pascapanen aneka umbi.				
7	06	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	06.01	a Pengolahan Hasil Pertanian	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	06.01.1	1) Tanaman Pangan - Serealia - Aneka Kacang dan Aneka Umbi				
	06.01.2	2) Hortikultura - Tanaman Buah dan Savuran - Tanaman Florakultura dan Tanaman Obat				
	06.01.3	3) Perkebunan - Tanaman Semusim - Tanaman Tahunan				
	06.01.4	4) Peternakan - Ruminansia - Non Ruminansia				
	06.02	b Mutu dan Standarasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	06.02.1	1) Standardisasi - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan				
	06.02.2	2) Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan				
	06.02.3	3) Akreditasi dan Kelembagaan - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan				
	06.02.4	4) Kerjasama dan Harmonisasi - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan				
	06.03	b Pengembangan Usaha dan Investasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	06.03.1	1) Kemitraan dan Kewirausahaan - Kemitraan - Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	06.03.2	2) Investasi - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan				
	06.03.3	3) Promosi Dalam Negeri - Daya Saing - Eksibisi dan Ekspo				
	06.03.4	4) Promosi Luar Negeri - Daya Saing - Eksibisi dan Ekspo				
	06.04	c Pemasaran Domestik				
	06.04.1	1) Informasi Pasar - Analisis Pasar - Deseminasi Informasi Pasar				
	06.04.2	2) Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga - Pemantauan Pasar - Stabilisasi Harga				
	06.04.3	3) Sarana dan Kelembagaan Pasar - Sarana Pasar - Kelembagaan Pasar				
	06.04.4	4) Jaringan Pemasaran - Akses Pasar - Sarana Pemasaran				
	06.05	d Pemasaran Internasional				
	06.05.1	1) Analisis dan Pengembangan Ekspor	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
7	07 07.01 07.01.1	- Analisis Ekspor - Pengembangan Ekspor KETAHANAN PANGAN a Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 1) Ketersediaan Pangan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
	07.01.2	- Analisis Ketersediaan Pangan - Neraca bahan makanan atau NBM - Pola pangan harapan ketersediaan pangan - Hari besar keagamaan nasional - Pola Panen Bulanan 2) Akses Pangan /Sumber daya pangan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
	07.01.3	a) Analisis Akses Pangan - Kartu Akses pangan rumah tangga b) Pengembangan Akses Pangan -kios pangan masvarakat -Desa mandiri pangan 3) Kerawanan Pangan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana,JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
	07.02	- Analisis Kerawanan Pangan - Penanggulangan Kerawanan Pangan (PDRP) - Sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) - Food security vulnerability Atlas/FSVA - Kawasan Mandiri Pangan (KMP) b Distribusi dan Cadangan Pangan				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	07.02.1	1) Distribusi Pangan - Analisis Distribusi Pangan - Kelembagaan Distribusi Pangan - Bimtek dan supervisi distribusi pangan - Rantai pasokan serta iaringan distribusi pangan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
	07.02.2	2) Harga Pangan - Analisis Harga Pangan Produsen - Analisis Harga Pangan Konsumen - Penvusunan prognosa neraca pangan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
	07.02.3	3) Cadangan Pangan - Cadangan Pangan Pemerintah - Cadangan Pangan Masyarakat (Produsen/LDPM, Konsumen/LPM)	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
07.03	c	Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan				
07.03.1	1)	Konsumsi Pangan - Pola Konsumsi Pangan (PPH Konsumsi) - Kebutuhan Konsumsi Pangan - Kebutuhan Konsumsi Pangan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
			Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
07.03.2	2)	Penganekaragaman Pangan - Pengembangan Pangan Lokal	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
		- Promosi Penganekaragaman Pangan (Lomba Cipta Menu)	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
		- Kawasan rumah pangan lestari (KRPL)	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	07.03.3	3) Keamanan Pangan Segar - Pengawasan Keamanan Pangan Segar - Kelembagaan Keamanan Pangan - Bimtek dan supervisi - Sertifikasi jaminan keamanan pangan segar - Jejaring keamanan pangan daerah	Terbuka Terbuka	UMUM UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
	07.04	d Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan 1) Dewan Ketahanan Pangan d Penghargaan Ketahanan Pangan 2) Penghargaan ketahanan Pangan	Terbuka Terbuka	UMUM UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Sekretariat Sekretariat

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
V		PERDAGANGAN				
1	00	KEBIJAKAN Kebijakan tentang Perdagangan Dalam Negeri, Standarisasi dan perlindungan konsumen. Perdagangan Luar Negeri.	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Sekretariat
	00.01	a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan				
	00.02	b. Penyiapan bahan				
	00.03	c. Perumus Kebijakan				
	00.04	d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan				
	00.05	e. Penetapan dalam bentuk NSPK				
	00.06	f. perumusan dan penerapan standar				
2	01	PERDAGANGAN DALAM NEGERI				
	01.01	a Bina Usaha				
	01.01.1	1) Pelaku pasar	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
		-Pengecer				
		-Pemasok				
	01.02	b Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri				
	01.02.1	1) pengembangan produk lokal	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
		-Penelaahan potensi produk				
		-Fasilitasi penguatan produk				
	01.02.2	2) pencitraan produk dalam negeri	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
		-kerja sama peningkatan penggunaan produk dalam negeri				
		-peningkatan promosi				
	01.03	c Logistik dan Sarana Distribusi				
	01.03.1	1) Pengembangan sarana distribusi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	01.02.2	-Perencanaan -Bimbingan teknis pengembangan 2) Pengelolaan sarana distribusi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	01.04 01.04.1	-Bimbingan teknis pengelolaan -Evaluasi pengelolaan d Bahan Pokok dan Barang Strategis 1) Informasi Pasar	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	01.04.2	-Informasi harga -Pengumpulan - Pengolahan data - Penyiapan - Penvaian informasi - Analisis 2) Informasi non harga	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	01.04.3	- Pengumpulan - Pengolahan data - Penyiapan - Penvaian informasi - Analisis 3) Hasil industri	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	01.04.4	-Gula dan tepung -Minyak goreng dan garam 4) Barang strategis -Hasil agro -Hasil industri	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
3	01.04.5	5) Bahan pokok agro -Serelia -Hewan dan non serelia	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	02	STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
	02.01	a. Standardisasi				
	02.01.1	1) kelembagaan dan informasi standar -Hubungan kelembagaan -Informasi standar	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	02.01.2	2) kerjasama standarisasi -kerjasama regional	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	02.01.3	3) Perumusan dan Penerapan Standar -Penerapan Standar -Perumusan Standar	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	02.02	b. Pemberdayaan Konsumen				
	02.02.1	1) kerjasama, informasi, dan publikasi -kerja sama -informasi dan publikasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Industri
			Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	02.02.2	2) analisa penyelenggara perlindungan konsumen -konsultasi hukum -analisis	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	02.02.3	3) bimbingan konsumen dan pelaku usaha -bimbingan konsumen	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
4	02.02.4	-bimbingan pelaku usaha 4) fasilitasi kelembagaan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	02.03	-pemberdayaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masvarakat -pemberdayaan badan penvelesaian sengketa konsumen				
	02.03.1	c. Pengawasan Barang Beredar dan Jasa 1) produk pertambangan dan aneka industri	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	02.03.2	-produk pertambangan dan olahan -produk aneka industri 2) produk pertanian, kimia, dan kehutanan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	02.03.3	-produk pertanian dan kehutanan -produk kimia dan olahan 3) jasa	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	02.03.4	-jasa distribusi -jasa bisnis 4) kerjasama -kerja sama baik lembaga pemerintah dan non pemerintah	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	03	PERDAGANGAN LUAR NEGERI				
	03.01	a. Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan				
	03.01.1	1) Ekspor produk tanaman pangan, perikanan, dan peternakan -Tanaman pangan -Perikanan dan peternakan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	03.01.2	2) Perkebunan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	03.01.3	-Tanaman tahunan -Tanaman semusim 3) Hortikultura, rempah-rempah dan tanaman obat	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	01.01.4	-Hortikultura -Rempah-rempah dan tanaman obat 4) Kehutanan -Hasil kayu dan produk kayu -Hasil hutan bukan kayu	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	03.02 03.02.1	b. Ekspor Produk Industri dan Pertambangan 1) Produk TPT, aneka dan jasa	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	03.02.2	-Produk tekstil dan produk teksti (TPT) -Produk aneka dan jasa 2) Produk Logam, mesin, alat transportasi dan elektronika	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	03.02.3	-Logam dan mesin -Alat transportasi dan elektronika 3) Produk industri agro dan kimia -Produk industri agro	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	03.02.4	4) Produk pertambangan -Produk pertambangan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	03.03 03.03.1	c. Impor 1) Impor Barang Modal	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
		-Mesin dan peralatan mesin -Alat angkut				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	03.03.2	2) Barang pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan -Barang pertanian dan kehutanan -Barang kelautan dan perikanan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	03.03.3	3) Barang aneka industri dan bahan baku industri -Barang aneka industri -Bahan baku industri	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	03.03.4	4) Barang konsumsi -Barang konsumsi tahan lama -Barang konsumsi tidak tahan lama	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	03.03.5	5) Barang kimia, tambang dan limbah -Barang kimia dan bahan berbahaya -Barang tambang	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	03.04	d Fasilitasi Ekspor dan Impor				
	03.04.1	1) Kerjasama Internasional -Kerja sama regional -pembiayaan perdagangan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	03.04.2	2) Sumber pembiayaan dan sistem pembayaran -Penjaminan pembiayaan ekspor dan impor	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	03.04.3	3) Prosedur dan Dokumen -Prosedur ekspor dan impor -Dokumen ekspor dan impor	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	03.04.4	4) Pelayanan Perdagangan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
5	03.05 03.05.1	-Analisa pelayanan perdagangan -Fasilitasi pelayanan perdagangan e Pengamanan Perdagangan 1) Monitoring Hambatan Perdagangan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	03.05.2	-Monitoring -Evaluasi 2) Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	03.05.3	-Hambatan teknis perdagangan 3) Penanganan Tuduhan: -Dumping -Subsidi -Safeguard	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Industri
	04 04.01 04.01.1	KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL a. Perundingan Perdagangan Jasa 1) Jasa bisnis, distribusi, keuangan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	04.01.2	-Jasa bisnis dan distribusi -Jasa keuangan 2) Jasa konstruksi, pariwisata, rekreasi budaya dan olah raga, transportasi - Jasa konstruksi, pariwisata, rekreasi budaya dan olah raga	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	04.01.3	-Jasa transportasi 3) Jasa pendidikan, kesehatan -Jasa pendidikan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
6	04.01.4	-Jasa kesehatan 4) Jasa komunikasi, lingkungan dan jasa lainnya	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	04.01.5	-Jasa komunikasi -Jasa lingkungan dan jasa lainnya 5) Rules, peraturan domestik dan penyusunan analisis informasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
		-Rules dan peraturan domestik -Analisis informasi "perumusan"				
	05	PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL				
	05.01	a. Pasar dan Informasi Ekspor				
	05.01.1	1) Pengembangan pasar	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	05.01.2	2) Pengembangan sistem informasi ekspor a) Pengelolaan data ekspor	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
		- Pengumpulan - Pemutakhiran data eksportir, importir, dan harga komoditi - Pengolahan - Analisis data informasi ekspor berupa neraca perdagangan b) Sistem informasi ekspor	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	05.01.3	- Pengembangan aplikasi - Pengelolaan jaringan informasi - Pengembangan situs web 3) Pelayanan informasi ekspor	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
		- Pelayanan pelaku usaha - Publikasi informasi ekspor				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	05.02	b. Produk ekspor dan ekonomi kreatif				
	05.02.1	1) Hasil industri manufaktur -Mesin, logam, elektronika dan telematika -Pangan, tekstil dan produk tekstil, alat kesehatan dan aneka	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	05.02.2	2) Produk agro -Kehutanan dan perkebunan -Pertanian dan perikanan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	05.02.3	3) Jasa -Jasa bisnis dan profesi -jasa konstruksi dan distribusi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	05.02.4	4) Ekonomi kreatif - Media dan iptek - Seni budaya dan desain	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	05.03	c Kerja Sama Pengembangan Ekspor				
	05.03.1	1) Luar Negeri - Pemerintah - Non Pemerintah	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	05.03.2	2) Dalam Negeri - Pemerintah - Non Pemerintah	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	05.04	d Promosi dan Citra				
	05.04.1	1) promosi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
7	05.04.2	2) Perencanaan dan pemantauan citra - perencanaan - pemantauan dan evaluasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	05.04.3	3) Penerapan citra - penerapan citra dalam dan luar negeri	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	06.01	PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI				
	06.01.1	a. Perniagaan 1) Bina Usaha - kelembagaan dan pelaku penunjang	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	06.01.2	- pelaku pasar 2) Pengawasan Transaksi - Kelembagaan dan pelaku penunjang	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	06.01.3	- Pelaku pasar 3) Pengawasan keuangan dan audit - Pemantauan dan evaluasi keuangan - Audit kepatuhan dan keuangan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	06.02	b. Analisis Pasar	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	06.02.1	1) Pengkajian pasar - Pengkajian pasar fisik dan penyerahan -Posisi dan pelaporan				
	06.02.2	2) Pengembangan pasar - Kelembagaan dan produk	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	06.02.3	- Tata tertib dan kontrak 3) Sistem informasi - Teknologi informasi - Data	Terbatas Terbatas	JPT,Administrator,Penga was Pelaksana.JFA JPT,Administrator,Penga was Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan Bidang Perdagangan
	06.03 06.03.1	c. Pasar Fisik dan Jasa 1) Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	06.03.2	- Pembinaan penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang - Pembinaan pelaku sistem resi gudang 2) Pengawasan pasar lelang	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
	06.03.3	- Pengawasan transaksi - Pengawasan penyelenggara dan pelaku pasar lelang 3) Pengawasan sistem resi gudang - Pengawasan pengelola agunan dan lembaga sertifikasi - Pengawasan lembaga penjamin dan agen penjual	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
8	07	BIMBINGAN TEKNIS	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
9	08	EVALUASI	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perdagangan
VI	DISHUB	PERHUBUNGAN				
1	00 00.01	KEBIJAKAN Kebijakan mengenai Angkutan Jalan, Lalu lintas jalan, pelayaran, penerbangan, dan Perkerataapian : a Pengkajian dan pengusulan kebijakan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Sekretariat

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	00.02 00.03 00.04 00.05	a Penyiapan kebijakan c Perumusan dan penyusunan bahan d Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan e Penetapan dalam bentuk NSPK				
2	01 01.01 01.01.1	Angkutan Jalan a. Jaringan Transportasi jalan 1) Jaringan Prasarana dan Pelayanan a) Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi b) Penentuan lokasi terminal tipe B	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Lalin, Bidang Angkutan
	01.02 01.02.1	b Angkutan Orang dalam Trayek 1) Rencana umum jaringan trayek antarkota dalam provinsi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Lalin, Bidang Angkutan
	01.02.2	2) Pertimbangan teknis angkutan antar kota antar provinsi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Lalin, Bidang Angkutan
	01.02.3	3) Rekomendasi perijinan (ijin trayek, Insidentil)kendaraan angkutan dalam travek (AKDP) dan ...	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Lalin, Bidang Angkutan
	01.03 01.03.1	c Angkutan Orang tidak dalam Trayek 1) Angkutan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasi melalui Kabupaten/Kota dalam satu provinsi a) Penetapan Wilayah Operasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Lalin, Bidang Angkutan
		b) Perizinan operasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Lalin, Bidang Angkutan
	01.03.2	2) Rekomendasi perizinan angkutan orang, angkutan antarjemput, angkutan antarkota dalam provinsi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Lalin, Bidang Angkutan
	01.03.3	3) Penyediaan angkutan umum untuk angkutan jasa, angkutan barang lintas daerah dalam satu provinsi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Lalin, Bidang Angkutan

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
3	01.03.4	4) Penyediaan teknologi informasi angkutan jalan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Lalin, Bidang Angkutan
	01.03.5	a) Sistem Informasi angkutan jalan 5) Perijinan angkutan orang tidak dalam trayek lainnya	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Lalin, Bidang Angkutan
	01.04	d Pemadu Moda dan Pengembangan				
	01.04.1	1) Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penyediaan Pemadu Moda	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Lalin
	01.04.2	2) Angkutan perkotaan yang melampaui batas satu daerah a) Rencana umum Jaringan Trayek, perijinan dan tarif	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Lalin
	01.04.3	3) Rencana Induk Jaringan Lalulintas	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Lalin
	01.04.4	4) Pengelolaan data dan informasi transportasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Lalin
	02	Lalulintas Jalan				
	02.01	a Manajemen lalulintas jalan				
	02.01.1	1) Perumusan dan pelaksanaan Teknis manajemen lalulintas jalan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Lalin
	02.01.2	2) Monev penyusunan program	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Lalin
	02.01.3	3) Persetujuan hasil analisis dampak lalintas pada jalan provinsi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Lalin
	02.02	b Rekayasa lalulintas jalan				
	02.02.1	1) Teknis Rekayasa lalulintas Jalan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Lalin
	02.02.2	2) Monev penyusunan program	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Lalin

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
3	02.02.3	3) Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Lalulintas Jalan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Lalin
	02.03	c Keselamatan Lalulintas dan Angkutan Jalan				
	02.03.1	1) Teknis Keselamatan lalulintas dan angkutan Jalan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Lalin, Bidang Angkutan
	02.03.2	2) Monev penyusunan program	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Lalin, Bidang Angkutan
	02.03.3	3) Pemeriksaan laik fungsi jalan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Lalin, Bidang Angkutan
	02.03.4	4) Fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Lalin, Bidang Angkutan
	02.03.5	5) Fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalulintas	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Lalin, Bidang Angkutan
	02.03.6	6) Fasilitasi kelaikan kendaraan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Lalin, Bidang Angkutan
	02.03.7	7) Penegakan hukum di bidang lalin oleh PPNS	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Lalin, Bidang Angkutan
	03	PELAYARAN, PENERBANGAN, DAN PERKERETAAPIAN				
	03.01	a Angkutan Laut, Penyeberangan, Udara, dan Kereta Api				
	03.01.1	1) Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan pemantauan, serta evaluasi angkutan laut Penyeberangan, Udara, dan Kereta Api	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayaran, Penerbangan dan Perkeretaapian
	03.01.2	2) Pemantauan, koordinasi, pengendalian, pelaksanaan tarif maksimum	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayaran, Penerbangan dan Perkeretaapian
	03.01.3	3) Penerbitan izin, jasa usaha yang terkait dengan angkutan, penyebrangan, udara dan kereta api	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayaran, Penerbangan dan Perkeretaapian
	03.01.4	4) Pengendalian dan Pengawasan Badan Usaha di Pelabuhan, Bandar Udara, dan Stasiun Kereta Api	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayaran, Penerbangan dan Perkeretaapian

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	03.01.5	5) Penetapan tarif penumpang kereta api dalam pelayanan melebihi satu kab/kota dalam provinsi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayaran, Penerbangan dan Perkeretaapian
	03.01.6	6) Persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayaran, Penerbangan dan Perkeretaapian
	03.02	b Pengembangan Sapras laut, Penveberangan, Udara, dan Kereta Api				
	03.02.1	a Program pengembangan sarana prasarana pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayaran, Penerbangan dan Perkeretaapian
	03.02.2	b Rencana penyusunan wilayah pesisir dan pulau-pulau terkecil dalam halwilayah alur pelayaran	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayaran, Penerbangan dan Perkeretaapian
	03.02.3	e Penyediaan Data Penyusunan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayaran, Penerbangan dan Perkeretaapian
	03.02.4	c Penetapan rencana Induk Perkeretaapian	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayaran, Penerbangan dan Perkeretaapian
	03.02.5	d Peyusunan bahan penetapan jaringan pelayanan kereta api khusus	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayaran, Penerbangan dan Perkeretaapian
	03.03	c Keselamatan laut, penyebarangan, udara, dan kereta api				
	03.03.1	1) Rekomendasi ijin mendirikan bangunan terhadap bangunan tinggi, tower atau antenna a) Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) b) Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKP)	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayaran, Penerbangan dan Perkeretaapian
VII		KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1	00	Kebijakan				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
2		Perikanan tangkap dan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan perikanan, Perikanan Budidaya, Pengelolaan Ruang Laut dan Pengutan Langkah kebijakan : 00.01 a pengkajian dan pengusulan kebijakan 00.02 b penyiapan bahan 00.03 c perumusan kebijakan 00.04 d pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 00.05 e penetapan kebijakan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Sekretariat
	01 01.01 01.01.1	Perikanan Tangkap a Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pengendalian Penangkapan Ikan 1) Data dan Statistik Perikanan Tangkap a) pengumpulan dan pengolahan b) analisis dan penvajian	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	01.01.2	2) Sumber Daya Ikan Perairan Umum a) pengendalian penangkapan ikan laut dan perairan umum	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	01.01.3	3) Pengelolaan Sumber daya di perairan pedalaman, laut teritorial, perairan Kepulauan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	01.01.4	a) Inventarisasi sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan b) Identifikasi sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan c) Monitoring dan Evaluasi sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan 4) Pengelolaan Sumber Daya Ikan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Laut Lepas a) Inventarisasi sumber daya ikan Zona Ekonomi Eksklusif dan laut lepas b) identifikasi sumber daya ikan zona ekonomi eksklusif dan laut lepas c) tata kelola sumber daya ikan zona ekonomi eksklusif dan laut lepas	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
		b) identifikasi sumber daya ikan zona ekonomi eksklusif dan laut lepas	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
		c) tata kelola sumber daya ikan zona ekonomi eksklusif dan laut lepas	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	01.02 01.02.1	b Pelabuhan Perikanan 1) Identifikasi dan Penyiapan Pelabuhan Perikanan a) identifikasi dan analisis b) penyiapan bangunan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	01.02.2	2) Tata Operasional Pelabuhan Perikanan a) tata laksana pelabuhan perikanan b) pengusaha dan pelavanan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	01.02.3	3) Pengendalian Pembangunan Pelabuhan Perikanan a) bimbingan pembangunan pps, ppn, dan ppp	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	01.02.4	4) Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan a) tata laksana dan sarana b) keselamatan pelavaran	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	01.02.5	5) Pemantauan dan Evaluasi Pelabuhan Perikanan a) pemantaun dan evaluasi pps,ppn, dan ppp	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	01.03	c. Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	01.03.1	1) Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	01.03.2	a) rancang bangun kapal perikanan b) kelaikan kapal perikanan 2) Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Penangkapan Ikan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	01.03.3	a) rancang bangun alat penangkapan ikan b) kelaikan alat penangkapan ikan 3) Pendaftaran Kapal Perikanan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	01.03.4	a) identifikasi dan pengukuran b) pencatatan dan dokumentasi 4) Pemantauan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	01.04	a) pemantauan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan b) evaluasi dan pelaporan d. Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan				
	01.04.1	1) Alokasi Usaha Penangkapan Ikan				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		a) verifikasi alokasi usaha penangkapan ikan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	01.04.2	b) pelayanan alokasi usaha penangkapan ikan 2) Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	01.04.3	a) verifikasi pengusahaan penangkapan ikan b) administrasi pengusahaan penangkapan ikan 3) Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	01.04.4	a) verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan perikanan berbadan hukum b) verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan perorangan dan koperasi c) pemantauan dan evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan d) pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan e) evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan 4) Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	01.04.5	a) penerbitan dokumen penangkapan ikan b) tata laksana dokumen penangkapan ikan 5) Pemantauan dan evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	01.05 01.05.1	a) pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan b) evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan e Pengembangan Usaha Penangkapan 1) Kelembagaan Usaha a) tata laksana kelembagaan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
		b) kerja sama usaha	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	01.05.2	2) Investasi dan Pemodalan Usaha a) tata laksana investasi dan pemodalan usaha	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b) bimbingan investasi dan pemodalan usaha	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	01.05.3	3) Kenelayanan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	01.05.4	a) identifikasi dan kapasitas nelavan b) bimbingan nelavan 4) Pembinaan pengelolaan usaha	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	01.05.5	a) bimbingan pengelolaan usaha b) bimbingan diversifikasi usaha 5) Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan a) pemantauan usaha penangkapan ikan b) evaluasi usaha penangkapan ikan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3	02 02.01 02.01.1	PERIKANAN BUDIDAYA a. Kawasan Budidaya 1) Pengembangan kawasan budidaya ikan air tawar dan airpayau	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang perikanan Budidaya

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	02.01.2	a) identifikasi potensi b) penataan 2) Infrastruktur kawasan perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang perikanan Budidava
	02.01.3	3) Pemanfaatan kawasan budidaya air payau, air tawar dan air laut	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang perikanan Budidava
	02.01.4	4) Prasarana dan Sarana Budidaya Air payau, air tawar dan air laut a) Fasilitas b) pemantauan dan evaluasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang perikanan Budidava
	02.01.5	5) Minapolitan Budidaya	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang perikanan Budidava
	02.02	a) identifikasi potensi b) pemanfaatan potensi				
	02.02.1	b Perbenihan 1) Induk	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang perikanan Budidava
	02.02.2	a) pengelolaan induk ikan air tawar b) pengelolaan induk ikan air payau dan laut 2) Perbenihan Skala Kecil	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang perikanan Budidava
	02.02.3	a) perbenihan skala kecil ikan air tawar b) perbenihan skala kecil ikan air laut 3) Perbenihan Skala Besar	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang perikanan Budidava
	02.02.4	a) perbenihan skala besar ikan air tawar b) perbenihan skala besar ikan air payau dan laut 4) Standarisasi dan Sertifikasi Perbenihan a) standarisasi perbenihan b) sertifikasi perbenihan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang perikanan Budidava

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	02.02.5	5) Informasi dan Distribusi Perbenihan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang perikanan Budidava
	02.03	a) informasi perbenihan b) distribusi perbenihan				
	02.03.1	c Produksi 1) budidaya air tawar	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang perikanan Budidava
		a) standarisasi b) penerapan teknologi budidaya air tawar				
	02.03.2	2) budidaya air payau dan laut	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang perikanan Budidava
		a) standarisasi b) penerapan teknologi budidaya air payau dan laut				
	02.03.3	3) budidaya ikan hias	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang perikanan Budidava
		a) standarisasi b) penerapan teknologi budidaya ikan hias				
	02.03.4	4) sertifikasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang perikanan Budidava
		a) penerapan sertifikasi b) monitoring dan evaluasi sertifikasi				
	02.03.5	5) data dan statistik perikanan budidaya	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang perikanan Budidava
		a) pengumpulan dan pengolahan data b) analisis dan penyajian data statistik				
	02.04	Kesehatan Ikan dan Lingkungan				
	02.04.1	d 1) hama dan penyakit ikan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang perikanan Budidava
		a) metode dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan b) monitoring dan evaluasi hama dan penyakit ikan				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	02.04.2	2) perlindungan lingkungan budidaya a) pengendalian lingkungan budidaya b) rehabilitasi lingkungan budidaya	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang perikanan Budidaya
	02.04.3	3) standarisasi dan kesehatan dan lingkungan a) standarisasi laboratorium dan kesehatan dan lingkungan b) standarisasi metode uji kesehatan ikan dan lingkungan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang perikanan Budidaya
	02.04.4	4) obat ikan, kimia, dan bahan biologi a) registrasi obat ikan, kimia dan bahan biologi b) monitoring dan evaluasi obat ikan, kimia, dan bahan biologi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang perikanan Budidaya
	02.04.5	5) pengendalian residu a) perencanaan pengendalian residu b) tindak lanjut pengendalian residu	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang perikanan Budidaya
	02.05	e Usaha Budidaya				
	02.05.1	1) investasi dan permodalan a) investasi b) permodalan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang perikanan Budidaya
	02.05.2	2) kewirausahaan a) bimbingan usaha b) kemitraan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang perikanan Budidaya
	02.05.3	3) pelayanan usaha a) perizinan b) pemantauan dan evaluasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang perikanan Budidaya

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
4	02.05.4	4) kelembagaan dan ketenagakerjaan a) kelembagaan b) ketenagakerjaan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang perikanan Budidava
	02.05.5	5) infomasi usaha dan promosi a) informasi usaha b) promosi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang perikanan Budidava
	03	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
	03.01	a Pengolahan Hasil				
	03.01.1	1) standarisasi a) analisis standar b) penerapan standar	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
	03.01.2	2) Pengembangan Produk a) pengembangan produk skala mikro,kecil,dan menengah b) pengembangan produk skala besar	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
	03.01.3	3) pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah a) bimbingan teknis usaha mikro.kecil. dan menengah b) kerja sama usaha mikro,kecil. dan menengah	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
	03.01.4	4) industri pengolahan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	03.01.5	a) bimbingan teknis industri pengolahan b) kerja sama asosiasi dan industri pengolahan 5) sarana dan prasarana	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
	03.02 03.02.1	a) sarana b) prasarana b Pengembangan Produk Non Konsumsi 1) standarisasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
	03.02.2	a) analisis standar b) penerapan standar 2) promosi dan jaringan pasar ikan hias	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
	03.02.3	a) promosi ikan hias b) iaringan pasar ikan hias 3) pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
	03.02.4	a) bimbingan teknis usaha mikro, kecil, dan menengah b) identifikasi dan evaluasi sentra pengolahan produk 4) pengembangan industri	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
		a) bimbingan teknis industri b) kerja sama industri				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	03.02.5	5) sarana dan prasarana	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
		a) sarana b) prasarana				
	03.03.1	c Pemasaran Dalam Negeri 1) kelembagaan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
		a). kelembagaan pelaku pasar hasil perikanan b). kelembagaan pasar hasil perikanan				
	03.03.2	2) analisis dan informasi pasar dalam negeri	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
		a) analisis pasar dalam negeri b) informasi pasar dalam negeri				
	03.03.3	3) jaringan distribusi dan kemitraan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
		a) jaringan distribusi b) kemitraan				
	03.03'4	4) promosi dan kerja sama	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
		a) promosi				
		b) kerja sama	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	03.03.5	5) sarana dan prasarana	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
	03.04	a) sarana b) prasarana				
	03.04.1	d Pemasaran Luar Negeri 1) kelembagaan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
	03.04.2	a) analisis kelembagaan b) kerja sama kelembagaan 2) analisis dan informasi pasar luar negeri	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
	03.04.3	a) analisis kebutuhan import b) informasi pasar luar negeri 3) pengembangan ekspor	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
	03.04.4	a) peningkatan akses pasar b) pengamanan dan perlindungan akses pasar 4) pengendalian impor	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
	03.04.5	a) analisis kebutuhan impor b) pemantauan dan evaluasi impor 5) promosi dan kerjasama a) promosi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b) kerja sama	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
	03.05	e Usaha dan investasi				
	03.05.1	1) pelayanan usaha	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
		a) pelayanan usaha mikro, kecil, dan menengah b) pelayanan usaha besar				
	03.05.2	2) kemitraan usaha	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
		a) kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah b) kemitraan usaha besar				
	03.05.3	3) ketenagakerjaan pengolahan dan pemasaran	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
		a) tenaga kerja pengolahan b) tenaga kerja pemasaran				
	03.05.4	4) investasi dan permodalan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
		a) investasi b) permodalan				
	03.05.5	5) informasi dan promosi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
		a) informasi b) Promosi				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
5	04 04.01 04.01.1	KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL a. Pesisir dan Lautan 1) mitigasi bencana lingkungan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
	04.01.2	a) mitigasi bencana pesisir dan lautan b) adaptasi dampak perubahan iklim 2) pendayagunaan sumber daya kelautan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
	04.01.3	a) benda muatan kapal tenggelam b) iasa kelautan 3) penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir dan laut	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
	04.01.4	a) penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir b) penanggulangan pencemaran sumber daya laut 4) rehabilitasi dan reklamasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
	04.02 04.02.1	b. Pendayagunaan Pulau-Pulau Terkecil 1) identifikasi pulau-pulau terkecil	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
		a) identifikasi potensi pulau-pulau terkecil b) data dan informasi pulau-pulau terkecil				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	04.02.2	2) pengelolaan eksosistem pulau-pulau terkecil	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
	04.02.3	a) rehabilitasi b) mitigasi dan adaptasi 3) investasi dan promosi pulau-pulau terkecil	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
	04.02.4	a) fasilitas investasi b) promosi 4) sarana dan prasarana pulau-pulau terkecil	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
04.03	04.03.1	c. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha 1) akses permodalan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
	04.03.2	a) akses perbankan b) akses nonbank 2) akses ilmu pengetahuan dan teknologi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
	04.03.3	a) identifikasi ilmu pengetahuan dan teknologi b) implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 3) sosial budaya masyarakat	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
		a) penguatan kelembagaan masyarakat				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
6	04.03.4	b) peningkatan peran serta masyarakat 4) pengembangan usaha a) pelavanoan usaha b) usaha mikro	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
	05 05.01 05.01.1	PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN a Pengawasan Sumber Daya Kelautan 1) pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
	05.01.2	a) pengawasan ekosistem perairan b) pengawasan kawasan konservasi 2) pengawasan pencemaran perairan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
	05.01.3	a) pengawasan pencemaran pesisir laut dan pesisir pantai b) pengawasan pencemaran perairan umum dan pedalaman 3) pengawasan pesisir dan pulau-pulau terkecil	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
	05.01.4	a) pengawasan pesisir b) pengawasan pulau-pulau terkecil 4) pengawasan jasa kelautan dan sumber daya non hayati a) pengawasan jasa kelautan b) pengawasan sumber daya non hayati	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	05.02 05.02.1	b. Kapal Pengawas 1) logistik operasional	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
	05.02.2	a) logistik b) operasional 2) perawatan kapal pengawas	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
	05.02.3	3) pengawakan kapal pengawas	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
	05.03 05.03.1	c. Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan 1) sistem pemantauan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
	05.03.2	a) pengembangan sistem pemantauan b) kerja sama pemantauan 2) pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
	05.03.3	a) operasional sistem pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan b) analisis hasil pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan 3) pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
		a) operasional sistem pemantauan sumber daya perikanan				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	05.03.4	b) analisis hasil pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan 4) pengembangan infrastruktur pengawasan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
	05.04 05.04.1	a) penyiapan infastruktur b) evaluasi infrastruktur d Penanganan pelanggaran 1) penyidikan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana,JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
	05.04.2	2) penanganan barang bukti dan awak kapal	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana,JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
	05.04.3	3) kerjasama penegakan hukum dan fasilitas PPNS perikanan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana,JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
	05.04.4	a) kerjasama penegakan hukum b) fasilitas PPNS perikanan 4) pemantauan dan evaluasi a) pemantauan b) evaluasi	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana,JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
VIII	DPMES DM NAKER TRANS	PENANAMAN MODAL				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	00	Kebijakan Kebijakan di bidang Perencanaan Penanaman Modal, Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Promosi Penanaman Modal. Pelayanan 00.01 a Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan 00.02 b Penyiapan Kebijakan 00.03 c Perumusan Kebijakan 00.04 d Masukan dan Dukungan Kebijakan 00.05 e Penetapan NSPK	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Penanaman Modal
2	01	Perencanaan Penanaman Modal				
	01.01	a. Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya				
	01.01.1	1) Agribisnis a) Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan b) Kelautan, Perikanan dan Peternakan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Penanaman Modal
	01.01.2	2) Energi a) Energi Terbarukan b) Energi Tak Terbarukan				
	01.01.3	3) Sumber Daya Mineral a) Mineral Logam b) Mineral Non Logam				
	01.02	b. Perencanaan Jasa dan Kawasan				
	01.02.1	1) Jasa Perdagangan dan Pariwisata a) Jasa Perdagangan b) Jasa Pariwisata	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Penanaman Modal
	01.02.2	2) Jasa , Ketenagakerjaan, dan Jasa Lainnya a) Ketenagakerjaan b) Jasa Lainnya				
	01.03	c. Perencanaan Infrastruktur				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
3	01.03.1	1) Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan, dan Jembatan a) Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkeretaapian b) Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Penanaman Modal
	01.03.2	2) Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Air a) Infrastruktur Energi b) Infrastruktur Sumberdaya Air				
	01.03.3	3) Infrastruktur Transportasi Laut, Udara, dan Infrastruktur Lainnya a) Infrastruktur Transportasi Laut b) Infrastruktur Transportasi Udara dan Infrastruktur Lainnya				
	02	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Penanaman Modal
	02.01	a. Deregulasi Penanaman Modal				
	02.01.1	1) Sektor Primer a) Pertanian, Kelautan dan Perikanan b) Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan				
	02.01.2	2) Sektor Sekunder a) Industri Logam, Transportasi b) Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka				
	02.01.3	3) Sektor Tersier a) Pariwisata, Perdagangan dan Telekomunikasi b) Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Jasa Lainnya				
	02.02	b. Pengembangan Potensi Daerah				
	02.02.1	1) Sektor Primer dan Tersier a) Sektor Primer b) Sektor Tersier	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Penanaman Modal
	02.02.2	2) Sektor Sekunder a) Sektor Industri Logam, Transportasi				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
4	02.03	b) Sektor Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka c. Pemberdayaan Usaha	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Penanaman Modal
	02.03.1	1) Pembinaan dan Penyuluhan a) Pembinaan b) Penyuluhan				
	02.03.2	2) Kemitraan Usaha a) Sektor Primer dan Tersier b) Sektor Sekunder				
	02.03.3	3) Pelayanan Usaha a) Sektor Primer dan Tersier b) Sektor Sekunder				
	03	Promosi Penanaman Modal	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Penanaman Modal
	03.01	a. Pengembangan Promosi				
	03.01.1	1) Analisis Strategi Promosi a) Analisis Target Promosi b) Analisis Daya Saing Promosi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Penanaman Modal
	03.02	b. Promosi Sektoral				
	03.02.1	1) Promosi Industri Sumber Daya Alam, Jasa dan Kawasan a) Industri Sumber Daya Alam b) Jasa dan Kawasan				
	03.02.2	3) Promosi Infrastruktur a) Infrastruktur Transportasi, Jalan, dan Jembatan b) Infrastruktur Energi, Sumber Daya Air, dan Infrastruktur Lainnya				
	03.03	c. Pameran dan Sarana Promosi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Penanaman Modal
	03.03.1	1) Pameran a) Penyusunan Program dan Monitoring				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH					
1	2	3	4	5	6	7					
5	03.03.2	b) Penyelenggaraan dan Evaluasi	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Penanaman Modal					
	00.03.3	2) Media Cetak									
		a) Materi Promosi									
		b) Publikasi dan Distribusi									
6	04	3) Media Elektronik	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Penanaman Modal					
		a) Materi Promosi									
		b) Pelayanan Informasi									
		Kerjasama Penanaman Modal									
6	04.01	a. Kerjasama Nasional	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Penanaman Modal					
	04.02	b. Kerjasama Regional									
	04.03	c. Kerjasama Internasional									
	05	Pelayanan Penanaman Modal									
	05.01	a. Pelayanan Aplikasi					Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Penanaman Modal	
		05.01.1									1) Aplikasi Sektor Primer dan Tersier
											a) Aplikasi Baru
	b) Aplikasi Perluasan										
05.01.2	c) Aplikasi Perubahan										
	05.02	2) Aplikasi Sektor Sekunder	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Penanaman Modal					
		a) Aplikasi Baru									
b) Aplikasi Perluasan											
05.02.1	c) Aplikasi Perubahan										
	05.02	b. Pelayanan Perizinan					Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Penanaman Modal	
		05.02.1									1) Perizinan Sektor Primer dan Tersier
a) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana											
											b) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi
		c) Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa									

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
7	05.02.2	2) Perizinan Sektor Sekunder a) Industri Mesin, Logam dan Barang Logam b) Industri Kimia dan Barang Kimia c) Industri Aneka	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana,JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Penanaman Modal
	05.03	c. Pelayanan Fasilitas				
	05.03.1	1) Perizinan Sektor Primer dan Tersier a) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana b) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi c) Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa				
	05.03.2	2) Perizinan Sektor Sekunder a) Industri Mesin, Logam dan Barang Logam b) Industri Kimia dan Barang Kimia c) Industri Aneka	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Penanaman Modal
	06	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				
	06.01	a. Pemantauan Penanaman Modal				
	06.02	b. Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal				
	06.03	c. Fasilitasi Penyelesaian Masalah				
	06.04	d. Pengawasan Penanaman Modal				
	06.05	e. Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal				
	06.06	f. Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal				
IX	LH	LINGKUNGAN HIDUP				
1	00	KEBIJAKAN	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana,JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penataan dan Pengkajian Lingkungan
	00.01	Kebijakan di bidang Tata lingkungan, pengendalian pencemaran a Pengkajian dan pengusulan kebijakan: - Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Wilayah				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		- Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Sektor - Kajian Dampak Lingkungan - Pengembangan Perangkat Kebijakan				
	00.02	b Penyiapan bahan				
	00.03	c Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan				
	00.04	d Pengumpulan dan pengolahan data				
	00.05	e. penetapan dalam bentuk nspk				
2	01	TATA LINGKUNGAN				
	01.01	a. Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Pengendalian SDA dan Ekosistem
	01.01.1	1) Inventarisasi, penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup				
		a) Dokumentasi Inventarisasi				
		b) Pedoman Inventarisasi				
		c) Penetapan Ekoregion				
		d) Pedoman Penyusunan RPPLH Provinsi				
	01.01.2	2) Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam				
		a) Evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam				
		b) Kebijakan pemanfaatan sumber daya alam				
	01.02	b. Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Pengendalian SDA dan Ekosistem
	01.02.1	1) Evaluasi Penerapan				
	01.02.2	2) Perencanaan Lingkungan Hidup				
	01.03	c. Ekonomi Lingkungan				
	01.03.1	1) Perencanaan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Pengendalian SDA dan Ekosistem
		a) Valuasi Ekonomi				
		b) Internalisasi Lingkungan				
	01.03.2	2) Insentif dan Pendanaan Lingkungan				
	01.04	d. Dampak Lingkungan				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
3	01.04.1	1) Bimtek Dampak Lingkungan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penataan dan Pengkajian Lingkungan
	01.04.2	2) Penerapan Sistem Kajian Dampak Lingkungan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penataan dan Pengkajian Lingkungan
	01.04.3	a) Penilaian dokumen lingkungan b) Pemeriksaan dokumen lingkungan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penataan dan Pengkajian Lingkungan
		3) Evaluasi dan Tindak Lanjut				
	02 02.01	a) Evaluasi b) Tindak Lanjut	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penataan dan Pengkajian Lingkungan
		PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN				
		a. Pemantauan dan Pengawasan				
		1) Manufaktur, Prasarana dan Jasa				
		a) aneka industri b) Prasarana dan Jasa				
	02.01.2	2) Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas				
	02.01.3	3) Agro Industri dan Usaha Skala Kecil				
	02.01.4	a) Peternakan dan Perikanan b) Perkebunan c) Kehutanan dan Holtikultura d) Usaha Skala Kecil				
		4) Udara Sumber Bergerak				
		a) Transportasi Air dan Udara b) Transportasi Darat Transportasi Kereta Api dan Kendaraan Berat				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
4	02.02	b. Evaluasi dan Pengembangan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana,JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penataan dan Pengkajian Lingkungan
	02.02.1	1) Manufaktur, Prasarana dan Jasa a) Aneka Industri b) Prasarana dan Jasa	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Pengendalian SDA dan Ekosistem
	02.02.2	2) Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas				
	02.02.3	3) Agro Industri dan Usaha Skala kecil a) Peternakan dan Perikanan b) Perkebunan c) Kehutanan dan Holtikultura d) Usaha Skala Kecil				
	02.02.4	4) Udara Sumber Bergerak a) Transportasi Air dan Udara b) Transportasi Darat c) Transportasi Kereta Api dan Kendaraan Berat				
	03	PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN IKLIM				
	03.01	a. Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan				
	03.01.1	1) Pengembangan a) Sumber Daya Genetik b) Keamanan Hayati				
	03.01.2	2) Pemanfaatan a) Sumber Daya Genetik				
	03.01.3	3) Pengelolaan Sumber Daya Genetik a) Pengembangan dan Pemanfaatan b) Pemantauan dan Pengawasan				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	03.01.4	4) Keamanan Hayati	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Pengendalian SDA dan Ekosistem
	03.01.5	a) Pengembangan dan Pengelolaan b) Pemantauan dan Pengawasan 5) Pengendalian Kerusakan Lahan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Pengendalian SDA dan Ekosistem
	03.02	b. Kerusakan Ekosistem Perairan Darat	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Pengendalian SDA dan Ekosistem
	03.02.1	1) Kerusakan Ekosistem a) Sungai b) Kerusakan Ekosistem c) Pengelolaan Kualitas Air				
	03.02.2	2) Danau a) Pengendalian Kerusakan Ekosistem b) Pengelolaan Kualitas Air				
	03.02.3	3) Rawa a) Rawa gambut b) Rawa bukan gambut				
	03.03	c. Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Pengendalian SDA dan Ekosistem
	03.03.1	1) Pencegahan				
	03.03.2	2) Penanggulangan				
	03.03.3	3) Pemulihan				
	03.04	d. Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer				
	03.04.1	1) Perangkat Mitigasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penataan dan Pengkajian Lingkungan

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
5	03.04.2	2) Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penataan dan Pengkajian Lingkungan
	03.04.3	a) Data bidang inventarisasi GRK 3) Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penataan dan Pengkajian Lingkungan
	03.05	e. Adaptasi Perubahan Iklim				
	03.05.1	1) Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penataan dan Pengkajian Lingkungan
	03.05.2	b) Pemantauan dan evaluasi adaptasi perubahan iklim 2) Kerentanan Perubahan Iklim	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penataan dan Pengkajian Lingkungan
		a) Identifikasi dan analisis kerentanan perubahan iklim b) Media kliring kerentananan perubahan iklim				
	04	PENGELOLAAN B3, LIMBAH, DAN SAMPAH				
	04.01	a. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun				
	04.01.1	1) Registrasi dan notifikasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penataan dan Pengkajian Lingkungan
	04.01.2	a) Registrasi b) Notifikasi 2) Pemantauan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penataan dan Pengkajian Lingkungan
		a) Sektor industri b) Sektor non industri				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	04.01.3	3) Evaluasi dan Tindak Lanjut	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penataan dan Pengkajian Lingkungan
	04.02	a) Sektor industri b) Sektor non industri b. Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penataan dan Pengkajian Lingkungan
	04.02.1	1) Pengumpulan dan Pemanfaatan				
	04.02.2	2) Pengangkutan dan Pengolahan				
	04.02.3	3) Penimbunan dan Dumping				
	04.02.4	4) Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas Batas				
	04.03	a) Notifikasi b) Rekomendasi Limbah Lintas Batas c. Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3				
	04.03.1	1) Pemantauan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penataan dan Pengkajian Lingkungan
		a) Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas b) Agroindustri c) Prasarana, Jasa, dan Non Institusi				
	04.03.2	2) Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penataan dan Pengkajian Lingkungan
		a) Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas b) Agroindustri c) Prasarana, Jasa, dan Non Institusi				
	04.04	d. Pengelolaan Sampah	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penataan dan Pengkajian Lingkungan
	04.04.1	1) Pembatasan Sampah				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
6	04.04.2	2) Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi
	04.04.3	3) Pembentukan Dewan Adipura				
	04.04.4	4) Penetapan Pemenang Adipura				
	05	HUKUM LINGKUNGAN				
	05.01	a. Hukum Administrasi Lingkungan				
	05.01.1	1) Pengelolaan dan Pengembangan Pengaduan				
		a) Pengelolaan Pengaduan				
		b) Pengembangan Pengaduan				
	05.01.2	2) Penuaan Hukum Administrasi Lingkungan				
		a) Penerapan hukum administrasi lingkungan				
		b) Pengembangan hukum administrasi lingkungan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi
	05.02	b. Penyelesaian Sengketa Lingkungan				
	05.02.1	1) Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan				
		a) Administrasi Gugatan				
		b) Gugatan				
	05.02.2	2) Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan				
		a) Kerugian Negara dan Masyarakat				
		b) Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup				
	05.03	c. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan				
	05.03.1	1) Penyidikan				
		a) Administrasi Penyidikan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi
		b) Pelaksanaan Penyidikan				
	05.03.2	2) Koordinasi Penuntutan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
7	05.03.3	a) Koordinasi penuntutan b) Evaluasi dan tindak lanjut 3) Koordinasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi
	06 06.01	KOMUNIKASI LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
	06.01.1	a. Komunikasi Lingkungan 1) Pengembangan Komunikasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Pengendalian SDA dan Ekosistem
	06.01.2	a) Program Komunikasi b) Evaluasi Komunikasi 2) Publikasi dan Kampanye	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Pengendalian SDA dan Ekosistem
	06.02	b. Penguatan Inisiatif Masyarakat				
	06.02.1	1) Komunitas Pendidikan Lingkungan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Pengendalian SDA dan Ekosistem
	06.02.2	a) Pengembangan dan Bimbingan b) Evaluasi 2) Kearifan Lingkungan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Pengendalian SDA dan Ekosistem
	06.03	c. Peningkatan Peran Masyarakat				
	06.03.1	1) Masyarakat Perkotaan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Pengendalian SDA dan Ekosistem
	06.03.2	a) Masyarakat Kawasan Permukiman b) Masyarakat Kawasan Rentan 2) Masyarakat Pedesaan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Pengendalian SDA dan Ekosistem

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
8	06.04	a) Masyarakat Petani b) Masyarakat Nelayan d. Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Pengendalian SDA dan Ekosistem
	06.04.1 06.04.2	1) Organisasi Sosial Dan Masyarakat 2) Organisasi Profesi dan Dunia Usaha				
	07	PEMBINAAN SARANA TEKNIK LINGKUNGAN DAN PENINGKATAN	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Pengendalian SDA dan Ekosistem
	07.01	a. Data dan Informasi Lingkungan				
	07.01.1	1) Pengelolaan Data	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Pengendalian SDA dan Ekosistem
	07.01.2	a) Pengumpulan dan Pengolahan Data b) Manajemen Basis Data 2) Pengelolaan Informasi a) Analisis Data dan Penyajian Informasi				
	07.01.3	b) Perpustakaan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Pengendalian SDA dan Ekosistem
		3) Pengembangan Perangkat Lunak				
	07.01.4	a) Pengembangan Instrumen Layanan Informasi b) Pengembangan Instrumen Analisis Data	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Pengendalian SDA dan Ekosistem
		4) Pengembangan Sistem dan Pemeliharaan Jaringan				
	07.02	a) Pengembangan Sistem Jaringan b) Pemeliharaan Jaringan b. Kelembagaan Lingkungan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Pengendalian SDA dan Ekosistem
	07.02.1	1) Kelembagaan dan Tata Laksana a) Pengembangan Kelembagaan b) Tata Laksana				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	07.02.2	2) Fasilitas Standar Pelayanan Minimal	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Pengendalian SDA dan Ekosistem
	07.03	a) Fasilitas Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi				
	07.03.1	c Teknologi				
		1) Teknologi Ramah Lingkungan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Pengendalian SDA dan Ekosistem
		a) Pengembangan Kriteria Teknologi Ramah Lingkungan				
		b) Verifikasi Teknologi Ramah Lingkungan				
	07.04	d. Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan				
	07.04.1	1) Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Pengendalian SDA dan Ekosistem
		a) Pemantauan Kualitas Lingkungan				
		b) Kajian Kualitas Lingkungan				
	07.04.2	2) Laboratorium Rujukan dan Pengujian	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Pengendalian SDA dan Ekosistem
		a) Laboratorium Rujukan				
		b) Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi				
X		PERINDUSTRIAN				
1	00	KEBIJAKAN				
		Kebijakan mengenai industri agro, industri kecil menengah, pengembangan perwilayahan industri, pengkajian kebijakan iklim dan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perindustrian
	00.01	a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan				
	00.02	b. Penyiapan kebijakan				
	00.03	c. Perumusan dan penyusunan bahan				
	00.04	d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan				
	00.05	e. Penetapan dalam bentuk NSPK				
2	01	Iklim usaha dan kerjasama				
	01.01	a. Industri Manufaktur	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perindustrian

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	01.01.1	1) Industri material dasar logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, logam lainnva. a) Industri kimia dasar - Anorganik dasar - Organik Dasar - Dasar Lainnva b) Industri Tekstil dan aneka - Pakaian jadi, tekstil lainnva - Alas kaki, kulit, dan aneka				
	01.01.2	b. Industri Agro 1) Industri Hasil Hutan dan Perkebunan - Kayu dan Rotan - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya 2) Industri makanan, hasil laut, dan perikanan - Hasil Tanaman Pangan - Hasil Perkebunan - Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan 3) Industri minuman dan tembakau - Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan - Hasil Susu dan Minuman Lainnya	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perindustrian
	01.01.3	c. Industri kecil dan menengah 1) Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan - Pangan - Industri Kimia dan Bahan Bangunan 2) Industri Kerajinan dan Sandang - Kerajinan - Sandang	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perindustrian

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
3	02 02.01	Promosi Industri a. Industri Manufaktur	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perindustrian
	02.01.1	1) Industri material dasar logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, logam lainnya. a) Industri kimia dasar - Anorganik dasar - Organik Dasar - Dasar Lainnya b) Industri Tekstil dan aneka - Pakaian jadi, tekstil lainnya - Alas kaki, kulit, dan aneka	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perindustrian
	02.02	b. Industri Agro	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perindustrian
	02.02.1	1) Industri hasil hutan dan perkebunan - Kayu dan Rotan - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya				
	02.02.2	2) Industri makanan, hasil laut, dan perikanan - Hasil Tanaman Pangan - Hasil Perkebunan - Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan				
	02.02.3	3) Industri minuman dan tembakau - Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan - Hasil Susu dan Minuman Lainnya				
	02.03	c Industri Kecil dan Menengah	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perindustrian
	02.03.1	1) Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan - Pangan - Industri Kimia dan Bahan Bangunan				
	02.03.2	2) Industri Kerajinan dan Sandang - Kerajinan				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
4	03 03.01	- Sandang Standarisasi dan Teknologi a. Industri Manufaktur	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perindustrian
	03.01.1	1) Industri material dasar logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, logam lainnva. a) Industri kimia dasar - Anorganik dasar - Organik Dasar - Dasar Lainnva b) Industri Tekstil dan aneka - Pakaian jadi, tekstil lainnva - Alas kaki, kulit, dan aneka				
	03.02	b. Industri Agro	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perindustrian
	03.02.1	1) Industri hasil hutan dan perkebunan - Kayu dan Rotan - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya				
	03.02.2	2) Industri makanan, hasil laut, dan perikanan - Hasil Tanaman Pangan - Hasil Perkebunan - Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan				
	03.02.3	3) Industri minuman dan tembakau - Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan - Hasil Susu dan Minuman Lainnya				
	03.03	c. Industri Kecil dan Menengah	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perindustrian
	03.03.1	1) Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan - Pangan				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
5	03.03.2	- Industri Kimia dan Bahan Bangunan 2) Industri Kerajinan dan Sandang - Kerajinan - Sandang				
	04 04.01	Hak dan Kekayaan Intelektual a. Industri Manufaktur	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perindustrian
	04.01.1	1) Industri material dasar logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, logam lainnva. a) Industri kimia dasar - Anorganik dasar - Organik Dasar - Dasar Lainnva b) Industri Tekstil dan aneka - Pakaian iadi, tekstil lainnva - Alas kaki, kulit, dan aneka				
	04.02	b. Industri Agro	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perindustrian
	04.02.1	1) Idustri hasil hutan dan perkebunan - Kayu dan Rotan - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya				
	04.02.2	2) Industri makanan, hasil lauty, dan perikanan - Hasil Tanaman Pangan - Hasil Perkebunan - Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan				
	04.02.3	3) Idustri minumanan dan tembakau - Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan - Hasil Susu dan Minuman Lainnya				
	04.03	c. Industri kecil dan menengah	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perindustrian

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
6	04.03.1	1. Industri Kimia, Pangan, dan Bahan Bangunan - Pangan - Industri Kimia dan Bahan Bangunan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perindustrian
	04.03.2	2. Industri Kerajinan dan Sandang - Kerajinan - Sandang				
	05	Industri Hijau	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perindustrian
	05.01	a. Industri Manufaktur				
	05.01.1	1) Industri material dasar logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, logam lainnva. a) Industri kimia dasar - Anorganik dasar - Organik Dasar - Dasar Lainnva b) Industri Tekstil dan aneka - Pakaian jadi, tekstil lainnva - Alas kaki, kulit, dan aneka				
	05.02	b. Industri Agro				
	05.02.1	1) Industri hasil hutan dan perkebunan - Kayu dan Rotan - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya				
	05.02.2	2) Industri makanan, hasil laut dan perikanan - Hasil Tanaman Pangan - Hasil Perkebunan - Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan				
	05.02.3	3) Industri minuman dan tembakau - Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan - Hasil Susu dan Minuman Lainnya				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
7	05.03	c. Industri Kecil dan Menengah	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perindustrian
	05.03.1	1) Industri Kimia, Pangan, dan Bahan Bangunan - Pangan - Industri Kimia dan Bahan Bangunan				
	05.03.2	2) Industri Kerajinan dan Sandang - Kerajinan - Sandang				
8	06	Analisis industri Unggulan Provinsi -Kerja sama Industri Unggulan Provinsi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perindustrian
8	07	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri - Kerja sama Industri Unggulan Provinsi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Perindustrian
XI		PENANGGULANGAN BENCANA				
1	00	Kebijakan Penanggulangan Bencana meliputi kebijakan dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Sekretariat
	00.01	a Pengkajian dan pengusulan kebijakan				
	00.02	b Penyiapan kebijakan				
	00.03	c Perumusan dan penyusunan bahan				
	00.04	d Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan				
	00.05	e Penetapan dalam bentuk NSPK				
2	01	PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN				
	01.01	a. Pengurangan Resiko Bencana	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	01.01.1	1) Pencegahan a) Pengkajian Resiko b) Pengelolaan Resiko				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	01.01.2	2) Mitigasi a) Mitigasi Struktur b) Mitigasi Non Struktur				
	01.02	b. Pemberdayaan Masyarakat				
	01.02.1	1) Peran Lembaga Usaha a) Usaha Padat Modal b) Usaha Padat Karya	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	01.02.2	2) Peran Organisasi Sosial Masyarakat a) Organisasi Internasional b) Organisasi Sosial Masyarakat Nasional	Terbuka Terbuka	UMUM UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	01.02.3	3) Peran Masyarakat a) Peningkatan Kesadaran Masyarakat b) Peningkatan Ketahanan Masyarakat	Terbuka Terbuka	UMUM UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	01.03	c. Kesiapsiagaan				
	01.03.1	1) Peringatan Dini a) Pemaduan Sistem Jaringan b) Pemantauan dan Peringatan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	01.03.2	2) Perencanaan Siaga a) Kebutuhan dan Potensi Sumber Daya b) Penerapan Rencana Strategis	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	01.03.3	3) Penyiapan Sumber Daya a) Penyediaan dan Penyiapan Sumber Daya b) Pengendalian	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
3	02 02.01	PENANGANAN DARURAT a. Tanggap Darurat	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kedaruratan dan Logistik
	02.01.1	1) Perencanaan Darurat a) Pendataan Darurat b) Perencanaan Operasi				
	02.01.2	2) Pengendalian Operasi a) Pengorganisasian Pos Komando b) Sarana dan Prasarana Pos Komando				
	02.01.3	3) Penyelamatan dan Evakuasi a) Penyelamatan b) Evakuasi				
	02.02	b. Bantuan Darurat	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kedaruratan dan Logistik
	02.02.1	1) Bantuan Sandang Pangan a) Bantuan Sandang b) Bantuan Pangan				
	02.02.2	2) Bantuan Kesehatan dan Air Bersih a) Bantuan Kesehatan b) Bantuan Air Bersih				
	02.02.3	3) Bantuan Hunian Sementara a) Pembangunan Hunian Sementara b) Pendukung Hunian Sementara				
	02.03	c. Perbaikan Darurat				
	02.03.1	1) Pembersihan Lingkungan a) Penyiapan Peralatan b) Angkutan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kedaruratan dan Logistik
	02.03.2	2) Perbaikan Sarana Vital	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kedaruratan dan Logistik

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
4	02.03.3	a) Prasarana Sosial b) Prasarana Ekonomi 3) Pemantauan dan Pelaporan a) Pemantauan b) Pelaporan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kedaruratan dan Logistik
	03	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI				
	03.01	a. Penilaian Kerusakan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	03.01.1	1) Inventarisasi Kerusakan a) Inventarisasi Fisik b) Inventarisasi Sosial Ekonomi				
	03.01.2	2) Estimasi Pembiayaan a) Estimasi Pembiayaan Pembangunan b) Estimasi Pembiayaan Sosial Ekonomi				
	03.02	b. Pemulihan dan Peningkatan Fisik	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	03.02.1	1) Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Umum a) Rehabilitasi Fasilitas Umum b) Rekonstruksi Fasilitas Umum				
	03.02.2	2) Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Sosial a) Rehabilitasi Fasilitas Sosial b) Rekonstruksi Fasilitas Sosial				
	03.02.3	3) Rehabilitasi Rekonstruksi Perumahan a) Rehabilitasi Rekonstruksi Berat b) Rehabilitasi Rekonstruksi Ringan				
	03.03	c. Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	03.03.1	1) Pemulihan dan Peningkatan Sosial a) Pemulihan dan Peningkatan Sosial Budaya				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
5	03.03.2	b) Pemulihan dan Peningkatan Kesehatan 2) Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi a) Pemulihan Ekonomi b) Peningkatan Ekonomi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	03.04	d. Penanganan Pengungsi				
	03.04.1	1) Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi a) Perlindungan Pengungsi b) Pemberdayaan Pengungsi				
	03.04.2	2) Kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi a) Kompensasi b) Pengembalian hak				
	03.04.3	3) Penempatan Pengungsi a) Pemulangan dan Repatriasi b) Relokasi/Pengalihan				
	04	LOGISTIK DAN PERALATAN				
	04.01	a. Logistik				
	04.01.1	1) Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan a) Analisis Kebutuhan b) Pengadaan				
	04.01.2	2) Penyimpanan dan Distribusi a) Penyimpanan				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	04.02	b) Distribusi				
	04.02.1	b. Peralatan 1) Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	04.02.2	a) Analisis Kebutuhan b) Pengadaan 2) Penyimpanan dan Pemeliharaan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	04.02.3	a) Penyimpanan b) Pemeliharaan 3) Pengerahan dan Distribusi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
		a) Pengerahan b) Distribusi				
XII	PAR	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
1	00	Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi kebijakan dibidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Ekonomi	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang-Bidang
	00.01	a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan				
	00.02	b. Penyiapan kebijakan				
	00.03	c. Perumusan dan penyusunan bahan				
	00.04	d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan				
	00.05	e. Penetapan dalam bentuk NSPK				
2	01	Pengembangan destinasi pariwisata				
	01.01	a. Perancangan Destinasi dan Investasi, Industri Pariwisata	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
	01.01.1	1) Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (Kawasan Strategis Pariwisata)				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	01.01.2	2) Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata (Perancangan Destinasi Pariwisata)				
	01.01.3	3) Pengembangan Zona Kreatif -Zona Kreatif Berbasis Seni dan Budaya -Zona Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK				
	01.01.4	4) Invetasi Pariwisata -Pengembangan Potensi Investasi -Promosi Investasi				
	01.02	b. Pengembangan Daya Tarik Wisata				
	01.02.1	1) Bimtek Daya Tarik Wisata	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
	01.02.2	2) Fasilitas Pengembangan Daya Tarik Wisata	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
	01.02.3	3) Pengembangan daya tarik wisata kota pusaka	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
	01.02.4	4) Penilaian Kelayakan Tugas Pembantuan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
	01.02.5	5) Penghargaan Pengelolaan Daya Tarik Wisata (Cipta Award)	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	01.03	c Industri Pariwisata				
	01.03.1	1) Sarana Pariwisata -usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata -penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, serta tirta dan spa.	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Ekonomi Kreatif
	01.03.2	2) Jasa Pariwisata: -jasa transportasi wisata -jasa informasi pariwisata -penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi -jasa perjalanan wisata -jasa konsultan pariwisata -jasa pramuwisata dan penyelenggaraan pertemuan -insentif -konvensi -pameran	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Ekonomi Kreatif
	01.03.3	3) Pengembangan Produk dan Pelayanan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Ekonomi Kreatif
	01.04	d Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata				
	01.04.1	1) Perancangan dan Pemantauan Pemberdayaan Pariwisata	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Ekonomi Kreatif
	01.04.2	2) Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Ekonomi Kreatif
	01.04.3	3) Kemitraan dan Kelembagaan Masyarakat	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Ekonomi Kreatif
	01.05	e Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Ekonomi Kreatif
	01.05.1	1) Pengembangan Wisata Kulier dan Belanja				
	01.05.2	2) Pengembangan Rekreasi dan Hiburan -Pengembangan Wisata Spa dan Kesehatan				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
3	02 02.01 02.01.1 02.01.2 02.01.3 02.01.4 02.02 02.02.1 02.02.2 02.02.3 02.02.4 02.02.5 02.03	- Pengembangan Wisata Olah Raga 3) Pengembangan Wisata Alam dan Budaya 01.05.4 4) Pengembangan Wisata Konvensi, Insentif dan Event Pemasaran Pariwisata a. Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata 1) Informasi Pasar Dalam Negeri - Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri - Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri 2) Informasi Pasar Luar Negeri - Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri - Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri 3) Hubungan Lembaga Pariwisata dan Widya Wisata - Hubungan Lembaga Pariwisata - Widya Wisata 4) Perancangan Pemasaran Pariwisata - Perancangan Pemasaran Dalam Negeri - Perancangan Pemasaran Luar Negeri b. Promosi Pariwisata Luar Negeri 1) Wilayah ASEAN 2) Wilayah Asia 3) Wilayah Timur Tengah dan Afrika 4) Wilayah Amerika dan Pasifik 5) Wilayah Eropa c. Promosi Pariwisata Dalam Negeri	 Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka	 UMUM UMUM UMUM UMUM UMUM UMUM	 Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	 Bidang Ekonomi Kreatif Bidang Ekonomi Kreatif Bidang Ekonomi Kreatif Bidang Ekonomi Kreatif Bidang Ekonomi Kreatif Bidang Ekonomi Kreatif

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	02.04	d. Pencitraan Indonesia	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Ekonomi Kreatif
	02.04.1	1) Strategi Pencitraan Indonesia -Perencanaan Pencitraan Indonesia -Pemantauan dan Evaluasi Pencitraan Indonesia				
	02.04.2	2) Komunikasi Media Cetak, Media Elektronik dan Digital, dan Media Ruang -Promosi Media -Sarana dan Distribusi Media				
	02.04.2	3) Kerjasama dan Kemitraan -Kerjasama dan Kemitraan Antar Lembaga Pemerintah -Kerjasama dan Kemitraan Antar Lembaga Non-Pemerintah				
	02.05	e. Promosi Konvensi, Insentif, Event, dan Minat Khusus	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Ekonomi Kreatif
	02.05.1	1) Promosi KIE Korporasi -Korporasi Dalam Negeri -Korporasi Luar Negeri				
	02.05.2	2) Promosi KIE Pemerintah dan Non Pemerintah -Pemerintah -Non Pemerintah				
	02.05.3	3) Promosi Minat Khusus -Wisata Bahari -Wisata Non Bahari				
4	03	Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya				
	03.01	a. Pengembangan industri Perfilman				
	03.01.1	1) Fasilitasi Industri Perfilman -Fasilitasi Usaha Perfilman -Fasilitasi Kegiatan Perfilman	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Ekonomi Kreatif

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	03.01.2	2) Festival dan Eksibisi Film -Festival Film -Eksibisi Film	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Ekonomi Kreatif
	03.01.3	3) Produksi -Pengembangan Konten dan Lokasi Film -Pelayanan Produksi Film	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Ekonomi Kreatif
	03.01.4	4) Pemasaran Film -Distribusi Film -Pertunjukan Film	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Ekonomi Kreatif
03.02	b.	Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik				
03.02.1	1)	Pengembangan Seni Pertunjukan -Kreasi dan Produksi Seni Pertunjukan -Fasilitasi Pengembangan Seni Pertunjukan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Ekonomi Kreatif
03.02.2	2)	Pengembangan Industri Musik -Kreasi dan Produksi Musik -Fasilitasi Pengembangan Industri Musik	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Ekonomi Kreatif
03.02.3	3)	Pemasaran Seni Pertunjukan dan Industri Musik	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Ekonomi Kreatif
03.02.4	4)	Infrastruktur dan Dokumentasi Seni Pertunjukan dan Industri Musik -Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertunjukan -Dokumentasi dan Publikasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Ekonomi Kreatif
03.03	c.	Pengembangan Seni Rupa				
03.03.1	1)	Pengembangan Seni Rupa Murni, Seni Rupa Terapan, Fotografi -Kreasi dan Produksi Karya Seni	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Ekonomi Kreatif

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
5	03.03.2	-Fasilitasi Pengembangan Seni 2) Pemasaran dan Pengembangan Apresiasi -Distribusi dan Komersialisasi Karya Seni Rupa -Apresiasi Karya Seni Rupa	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Ekonomi Kreatif
	04	Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek				
	04.01	a. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Ekonomi Kreatif
	04.01.1	1) Pengembangan Film Animasi dan Komik				
	04.01.2	2) Pengembangan Tulisan Fiksi dan Non Fiksi				
	04.01.3	3) Pengembangan Karya Kreatif Audio dan Video				
	04.01.4	4) Pengembangan Karya Kreatif Periklanan -Iklan Cetak -Iklan Elektronik				
	04.02	b. Desain dan Arsitektur	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Ekonomi Kreatif
	04.02.1	1) Arsitektur dan Desain Interior				
	04.02.2	2) Komunikasi Visual -Desain Grafis -Komunikasi Visual				
	04.02.3	3) Desain Produk dan Kemasan				
	04.02.4	4) Mode -Desain Busana -Desain Non Busana				
	04.03	c. Kerjasama dan Fasilitas				
	04.03.1	1) Lisensi Teknologi -Pengembangan Teknologi -Pemanfaatan Teknologi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Ekonomi Kreatif

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
6	04.03.2	2) Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis -Pengembangan Sentra Inovasi -Pengembangan Inkubator Bisnis	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Ekonomi Kreatif
	04.03.3	3) Sentra Kreatif -Pengembangan Sentra Kreatif -Pengelolaan Sentra Kreatif	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Ekonomi Kreatif
	04.03.4	4 Akses Pembiayaan -Akses Pembiayaan Bank -Akses Pembiayaan Non Bank	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Ekonomi Kreatif
	05	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Ekonomi Kreatif
	05.01	a. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata				
	05.01.1	1) Program dan Evaluasi				
	05.01.2	2) Data dan Publikasi				
	05.02	b. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif				
	05.02.1	1) Program dan Evaluasi				
	05.02.2	2) Data dan Publikasi				
	05.03	c. Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif				
	05.03.1	1) Program dan Evaluasi				
	05.03.2	2) Penyelenggaraan dan Kerjasama				
	05.04	d. Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif				
	05.04.1	1) Program dan Evaluasi				
	05.04.2	2) Evaluasi dan Kerjasama				
XIII	KUKM	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
1	00	Kebijakan dalam Kelembagaan Koperasi dan UKM, usaha dan permodalan koperasi, pengawasan koperasi.	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang UMKM

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	00.01	a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan				
	00.02	b. Penyiapan kebijakan				
	00.03	c. Perumusan kebijakan				
	00.04	d. Pemberian masukan dan dukungan kebijakan				
	00.05	e. Penetapan dalam bentuk NSPK				
2	01	Monitoring dan Evaluasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang UMKM
3	02	Kelembagaan Koperasi dan UKM				
	02.01	a. Keanggotaan Koperasi				
	02.01.1	1) Partisipasi Usaha dan Permodalan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang UMKM
		- Partisipasi Usaha				
		- Partisipasi Permodalan				
	02.01.2	2) Partisipasi Pengawasan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang UMKM
		- Rapat Anggota				
		- Pengawasan				
	01.01.3	3) Pengembangan Anggota	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang UMKM
		- Kaderisasi				
		- Penyuluhan				
	01.02	b. Pengendalian dan Akuntabilitas				
	01.02.1	1) Pengendalian	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang UMKM
		- Pengendalian Intern				
		- Tindak Lanjut Hasil Pengendalian				
	01.02.2	2) Bidang Akuntabilitas dan Akuntansi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang UMKM
		- Akuntabilitas				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
4	01.02.3	- Akuntansi dan Audit 3) Monitoring dan Evaluasi - Monitoring - Evaluasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang UMKM
	03	Produksi				
	03.01	a Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang UMKM
	03.01.1	1) Tanaman Pangan - Padi - Palawija				
	03.01.2	2) Hortikultura - Buah-Buahan dan Tanaman Obat - Tanaman Hias dan Sayur				
	03.01.3	3) Sarana - Sarana Produksi - Sarana Pengolahan				
	03.02	b Kehutanan dan Perkebunan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang UMKM
	03.02.1	1) Kehutanan - Hutan Produksi - Hutan Kemasyarakatan				
	03.02.2	2) Perkebunan - Tanaman Semusim dan Rempah-Rempah - Tanaman Keras				
	03.02.3	3) Sarana - Sarana Produksi - Sarana Pengolahan				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	03.03	c Perikanan dan Peternakan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang UMKM
	03.03.1	1) Perikanan - Perikanan Tangkap - Perikanan Budidaya				
	03.03.2	2) Peternakan - Ternak Besar - Ternak Kecil				
	03.03.3	3) Sarana - Sarana Produksi - Sarana Pengolahan				
	03.04	d Industri Kerajinan dan Pertambangan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang UMKM
	03.04.1	1) Industri - Sandang, Logam dan Elektronika - Pangan, Kimia dan Aneka				
	03.04.2	2) Kerajinan - Logam - Non Logam				
	03.05	e Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang UMKM
	03.05.1	1) Ketenagalistrikan dan Konstruksi - Listrik - Konstruksi				
	03.05.2	2) Aneka Usaha - Jasa Umum - Angkutan				
	03.05.3	3) Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi - Pariwisata - Pos dan Telekomunikasi				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
5	04 04.01	Pembiayaan a Program Pendanaan 04.01.1 1) Program Pendanaan Jangka Pendek - Program Pendanaan Koperasi Jangka Pendek - Program Pendanaan UKM Jangka Pendek 04.01.2 2) Program Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang - Program Pendanaan Koperasi Jangka Menengah dan Panjang - Program Pendanaan UKM Jangka Menengah dan Panjang 04.01.3 3) Program Pendanaan Usaha Mikro dan Dana Bergulir - Program Pendanaan Usaha Mikro - Program Pendanaan Dana Bergulir	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Koperasi
	04.02	b Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam 04.02.1 1) Pengembangan dan Pengendalian KSP - Pengembangan Kelembagaan KSP - Pengendalian Kelembagaan KSP 04.02.2 2) Pengembangan dan Pengendalian USP Koperasi - Pengembangan USP Koperasi - Pengendalian USP Koperasi 04.02.3 3) Pengembangan dan Pengendalian USP-LKM - Pengembangan USP-LKM - Pengendalian USP-LKM	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Koperasi
	04.03	c Urusan Permodalan 04.03.1 1) Pengembangan Permodalan Sendiri - Permodalan Sendiri Koperasi - Permodalan Sendiri UKM	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Koperasi

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
6	04.03.2	2) Pengembangan Permodalan Luar - Permodalan Bank	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Koperasi
	04.03.3	3) Pengembangan Kredit Program - Kredit Program Bank				
	04.04 d	Asuransi dan Jasa Keuangan				
	04.04.1	1) Asuransi - Asuransi Koperasi - Asuransi UKM	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Koperasi
	04.05 e	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit				
	04.05.1	1) Lembaga Pembiayaan - Modal Ventura - Sewa Guna Usaha dan Anak Piutang				
	04.05.2	2) Penjaminan Kredit - Penjaminan - Asuransi Kredit	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Koperasi
	04.06 f	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)				
	05	Pemasaran dan Jaringan Usaha	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Koperasi
	05.01 a	Perdagangan Dalam Negeri				
	05.01.1	1) Pengadaan - Pengadaan Sektor Formal - Pengadaan Sektor Informal				
	05.01.2	2) Distribusi - Distribusi Sektor Formal - Distribusi Sektor Informal				
	05.01.3	3) Pengembangan				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	05.02	b Pengembangan Sektor Formal - Pengembangan Sektor Informal Ekspor dan Impor	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Koperasi
	05.02.1	1) Ekspor - Ekspor Koperasi - Ekspor UKM				
	05.02.2	2) Impor - Impor Koperasi - Impor UKM				
	05.03	c Sarana dan Prasarana Pemasaran	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Koperasi
	05.03.1	1) Sarana - Pengembangan Pasar Tradisional - Pengembangan Sentra Pemasaran				
	05.03.2	2) Prasarana - Lembaga Perantara - Fasilitas HAKI				
	05.03.3	3) Pengembangan Potensi Pemasaran - Pengembangan Potensi Pemasaran Koperasi				
	05.04	d Kemitraan dan Jaringan Usaha	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Koperasi
	05.04.1	1) Kemitraan - Kemitraan Koperasi - Kemitraan UKM				
	05.04.2	2) Jaringan Usaha - Jaringan Usaha Koperasi - Jaringan Usaha UKM				
	05.04.3	3) Pengembangan Kerja sama Kelembagaan - Pengembangan Kerja sama Kelembagaan Koperasi - Pengembangan Kerja sama Kelembagaan UKM				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
7	05.05	e Informasi dan Publikasi Bisnis	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Koperasi
	05.05.1	1) Pengumpulan Informasi - Pengumpulan Informasi Koperasi - Pengumpulan Informasi UKM	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Koperasi
	05.05.2	2) Pengolahan Informasi - Pengolahan Informasi Koperasi - Pengolahan Informasi UKM				
	05.05.3	3) Publikasi dan Promosi - Publikasi dan Promosi Koperasi - Publikasi dan Promosi UKM				
	05.06	f Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Koperasi
	06	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Koperasi
	06.01	a Pengembangan Kewirausahaan				
	06.01.1	1) Lembaga Kewirausahaan - Pengembangan Jaringan Kewirausahaan - Peningkatan Sumber Daya Kewirausahaan				
	06.01.2	2) Penumbuhan Kewirausahaan - Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan - Evaluasi Kewirausahaan				
	06.01.3	3) Sosialisasi Kewirausahaan - Perangkat Lunak - Promosi Kewirausahaan				
	06.02	b Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Koperasi
	05.02.1	1) Diklat Formal dan Informal - Diklat Formal - Diklat Informal				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	06.02.2	2) Diklat Non Formal - Perangkat Lunak - Sarana dan Prasarana Diklat	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Koperasi
	06.02.3	3) Kerjasama Lembaga Diklat - Hubungan Lembaga Diklat Pemerintah - Hubungan Lembaga Diklat Non Pemerintah				
	06.03 c	Peran Serta Masyarakat				
	06.03.1	1) Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi dan UKM - Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi - Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap UKM				
	06.03.2	2) Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi dan UKM - Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi - Peningkatan Dukungan LSM Terhadap UKM				
	06.03.3	3) Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi - Dukungan Organisasi Profesi terhadap Koperasi - Dukungan Organisasi Profesi terhadap UKM	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Koperasi
	06.04 d	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM				
	06.04.1	1) Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM - Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi - Monitoring dan Evaluasi Diklat UKM				
	06.04.2	2) Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal dan Informal - Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal - Monitoring dan Evaluasi Diklat Informal				
	06.04.3	3) Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat -Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Pemerintah -Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Non Pemerintah				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
8	07 07.01	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha a Produktifitas dan Mutu	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Koperasi
	07.01.1	1) Peningkatan Mutu - Disain - Standarisasi				
	07.01.2	2) Sertifikasi Produk - Sertifikasi - Label dan Merek				
	07.02	b Restrukturisasi Usaha	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Koperasi
	07.02.1	1) Restrukturisasi Manaiemen - Manaiemen Koperasi - Manaiemen UKM				
	07.02.2	2) Restrukturisasi Pendanaan - Pendanaan Koperasi - Pendanaan UKM				
	07.02.3	3) Restrukturisasi Kelembagaan - Restrukturisasi Kelembagaan Koperasi - Restrukturisasi Kelembagaan UKM				
	07.03	c Fasilitasi Investasi UKMK	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Koperasi
	07.03.1	1) Investasi Klaster UKMK - Fasilitasi Investasi UKMK Agro Bisnis - Fasilitasi Investasi UKMK Non Agro Bisnis				
	07.03.2	2) Pengembangan Keria Sama Investasi Usaha - Pengembangan Pangan - Pengembangan Non Pangan				
	07.03.3	3) Fasilitas Investasi Aneka Usaha UKMK - Fasilitas Investasi Usaha Koperasi				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
9	07.04	- Fasilitas Investasi Usaha UKM d Pengembangan Sistem Bisnis	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Koperasi
	07.04.1	1) Kerja Sama Usaha - Pertukaran Koperasi - Pertukaran UKM				
	08	Pengkajian Sumber Daya UKMK				
	08.01	a Penelitian Koperasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang UKMK
	08.01.1	1) Perencanaan dan Pengendalian - Perencanaan - Evaluasi dan Pelaporan				
	08.01.2	2) Penyelenggaraan - Kelembagaan Koperasi - Bisnis Koperasi				
	08.01.3	3) Tata Laksana Penelitian - Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi - Sarana dan Prasarana				
	08.02	b Penelitian UKM	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang UKMK
	08.02.1	1) Perencanaan dan Pengendalian - Perencanaan - Evaluasi dan Pelaporan				
	08.02.2	2) Penyelenggaraan - Kelembagaan UKM - Bisnis UKM				
	08.02.3	3) Tata Laksana Penelitian - Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi - Sarana dan Prasarana				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	08.03	c Penelitian Sumber Daya	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang UMKM
	08.03.1	1) Perencanaan dan Pengendalian - Perencanaan - Evaluasi dan Pelaporan				
	08.03.2	2) Penvelenggaraan - Sumber Dava Manusia - Pembiayaan				
	08.03.3	3) Tata Laksana Penelitian - Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi				
	08.04	d Pengembangan Perkaderan UMK	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang UMKM
	08.04.1	1) Penvuluhan - Penvelenggaraan - Materi Penvuluhan				
	08.04.2	2) Perkaderan - Penilaian - Pengembangan				
	08.04.3	3) Kerja Sama dan Jaringan - Lembaga Pemerintah - Lembaga Non Pemerintah				
XIV		KEHUTANAN				
1	00	Perumusan Kebijakan dibidang : Planologi Kehutanan, Bina Usaha kehutanan. Perlindungan Hutan dan Konservasi alam. Bina	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Sekretariat
	00.01	a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan				
	00.02	b. Penyiapan Kebijakan				
	00.03	c. Perumusan Kebijakan				
	00.04	d. Masukan dan dukungan kebijakan				
	00.05	e. Penetapan NSPK				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
2	01 01.01	Planologi Kehutanan a. Perencanaan Kawasan Hutan	Terbatas	JPT,Administrator,Penga was Pelaksana,JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
	01.01.1 01.02	1) Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan b. Penatagunaan Kawasan Hutan	Terbatas	JPT,Administrator,Penga was Pelaksana,JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Tata Hutan dan Pemanfaatn Kawasan Hutan
	01.02.1 01.03	1) Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan c. Pemantauan Sumber Daya Hutan	Terbatas	JPT,Administrator,Penga was Pelaksana,JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
	01.03.1 01.03.2 01.03.3 01.04	1) Pemantauan Sumber Daya Hutan 2) Pemetaan Sumber Daya Hutan 3) Jaringan Data Spasial d. Penggunaan Kawasan Hutan	Terbatas	JPT,Administrator,Penga was Pelaksana,JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Tata Hutan dan Pemanfaatn Kawasan Hutan
	01.04.1 01.04.2	1) Penggunaan Kawasan Hutan 2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan				
	01.04.3 01.05	3) Informasi Penggunaan Kawasan Hutan e. Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Tata Hutan dan Pemanfaatn Kawasan Hutan
	01.05.1 01.05.2 01.05.3	1) Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan 2) Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan 3) Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
4	02 02.01	Bina Usaha Kehutanan a. HPH /HTI/IUPHHK	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi
	02.01.1	1) Data areal HPH/HTI/IUPHHK				
	02.01.2	2) SK HPH/HTI/IUPHHK				
	02.01.3	3) Kerjasama				
	02.01.4	4) Pembatalan/Penolakan				
	02.01.5	5) Perpanjangan				
	02.02	b. Modal dan Peralatan				
	02.02.1	1) Investasi Industri	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	SDA
	02.02.2	2) Peralatan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	SDA
	02.02.3	3) Tenaga Kerja	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	SDA
	02.02.4	4) Pemegang Saham	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	SDA
	02.02.5	5) Neraca Perusahaan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	SDA
	02.03	c. Rencana Karva				
	02.03.1	1) Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	SDA
	02.03.2	2) Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	SDA
	02.03.3	3) Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	SDA
	02.03.4	4) Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	SDA
	02.04	d. Produksi	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana,JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	02.04.1 02.04.2 02.04.3 02.05	1) Target Produksi RKT dan Bagan Keria 2) Produksi Kavu 3) Produksi Non Kavu e Industri	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana,JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
	02.05.1 02.05.2 02.05.3 02.06	1) Industri Kavu HPH/HTI/IUPHHK 2) Industri Kavu Non HPH/HTI/IUPHHK 3) Industri Non Kavu f. Pembangunan Hutan Tanaman Industri	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
	02.06.1 02.06.2 02.07	1) Hutan Tanaman Industri Pulp 2) Hutan Tanaman Industri Pertukangan g Pelanggaran dan Sanksi	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi
	02.07.1	1) Pemblokiran	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi
	02.07.2	2) Denda	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi
	02.07.3 02.08	3) Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK h Pemanfaatan Hutan Produksi	Terbatas Terbuka	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA UMUM	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi
	02.08.1 02.08.2 02.08.3 02.08.4 02.09	1) Pola Pemanfaatan Hutan Produksi 2) Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi 3) Informasi Sumber Daya Hutan Produksi 4) Pengembangan Investasi Usaha i Pengembangan Hutan Alam	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi
	02.09.1	1) Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	02.09.2 02.09.3 02.09.4 02.10	2) Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil Hutan Kavu Hutan Alam 3) Produksi Hutan Alam 4) Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam j. Pengembangan Hutan Tanaman	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi
	02.10.1 02.10.2 02.10.3 02.10.4 02.10.5 02.11	1) Hutan Tanaman Industri 2) Hutan Tanaman Rakvat 3) Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil Hutan Kavu HutanTanaman I 4) Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman 5) Pembiayaan Hutan Tanaman k. Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan	Terbatas	JPT,Administrator,Penga was Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi
	02.11.1 02.11.2 02.11.3 02.11.4 02.12	1) Penerimaan Negara Bukan Pajak 2) Peredaran Hasil Hutan 3) Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan 4) Penertiban Peredaran Hasil Hutan l. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi
	02.12.1 02.12.2 02.12.3 02.13	1) Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan 2) Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan 3) Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan m. Pembinaan Hutan	Terbatas	JPT,Administrator,Penga was Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi
	02.13.1 02.13.2	1) Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK 2) Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur				
5	03	Standardisasi dan Lingkungan				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	03.01	a. Standardisasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	SDA
	03.01.1	1) Kayu				
	03.01.2	2) Non Kayu				
	03.01.3	3) Produk				
	03.01.4	4) Proses				
	03.02	b. Sarana Pengujian Hasil Hutan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	SDA
	03.03	c. Pengembangan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	SDA
	03.03.1	1) Pengembangan Perusahaan				
	03.03.2	2) Pengembangan Pemasaran				
	03.04	d. Pemasaran Hasil Hutan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	SDA
	03.05	e. Pengendalian Lingkungan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	SDA
	03.05.1	1) Amdal di dalam kawasan hutan				
	03.05.2	2) Amdal di luar kawasan hutan				
	03.06	f. Angkutan Hasil Hutan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	SDA
	03.06.1	1) Sarana dan prasarana (armada angkutan/				
	03.06.2	2) Pembinaan dan peningkatan daya hutan (angkutan dan bongkar muat)				
	03.07	g. Tata Usaha Hasil Hutan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	SDA
	03.07.1	1) Tanda Pengenal Perusahaan				
	03.07.2	2) Legalitas				
	03.07.3	3) Palu Tok Kualitas				
	03.07.4	4) Pass Angkutan				
	03.07.5	5) Sertifikat Ekspor Hasil Hutan				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
6	04 04.01	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam a. Konservasi Jenis dan Genetik				
	04.01.1	1) Flora dan Fauna yang Dilindungi	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi
	04.01.2	2) Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi
	04.01.3	3) Lembaga Konservasi/Kebun Binatang	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi
	04.01.4	4) Konvensi Keanekaragaman Hayati	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi
	04.02	b. Kawasan Konservasi	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana,JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
	04.02.1	1) Cagar Alam				
	04.02.2	2) Suaka Margasatwa				
	04.02.3	3) Taman Wisata				
	04.02.4	4) Taman Buru				
	02.04.5	5) Taman Nasional				
	02.04.6	6) Taman Hutan Raya				
	02.04.7	7) Hutan Lindung dan Suaka Alam				
	02.04.8	8) Lahan Basah dan Konservasi Laut				
	02.04.9	9) Gua/Karst				
	04.03	c. Pengamanan Hutan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi
	04.03.1	1) Pelanggaran				
	04.03.2	2) Bencana Alam				
	04.03.3	3) Kebakaran Hutan				
	04.03.4	4) Sengketa Hutan				
	04.03.5	5) Hama dan Penvakit				
	04.04	d. Penvidikan dan Perlindungan Hutan				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	04.04.1	1) Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi
	04.04.2	2) Penyidikan dan Perlindungan Wilayah	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi
	04.04.3	3) Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi
	04.05	e. Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
	04.05.1	1) Pengembangan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam				
	04.05.2	2) Pemanfaatan Jasa Lingkungan				
	04.05.3	3) Pemanfaatan Wisata Alam				
	04.06	f. Bina Cinta Alam				
	04.06.1	1) Cinta Alam	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
	04.06.2	2) Kader Konservasi Sumber Daya Alam	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
	04.06.3	3) Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
7	05	Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Perhutanan Sosial				
	05.01	a. Perbenihan				
	05.01.1	1) Pemolaan Benih	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi
	05.01.2	2) Kebun Benih	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	05.01.3	3) Tegakan Benih	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi
	05.01.4	4) Pengadaan Benih	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi
	05.01.5	5) Pengujian dan Penyimpanan Benih	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi
	05.01.6	6) Lalu Lintas Angkutan Benih	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi
	05.01.7	7) Pembibitan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi
	05.01.8	8) Pengembangan Sumber Benih	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi
	05.01.9	9) Pengembangan Usaha Perbenihan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi
	05.01.10	10) Pengendalian Peredaran Benih	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi
	05.02	b. Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi
	05.02.1	1) Pemolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan				
	05.02.2	2) Rehabilitasi Hutan				
	05.02.3	3) Rehabilitasi Lahan				
	05.02.4	4) Pengelolaan Hutan Mangrove, Hutan Pantai, Rawa dan Gambut				
	05.02.5	5) Reklamasi Hutan dan Konservasi Tanah				
	05.03	c. Tanaman Reboisasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi
	05.03.1	1) Reboisasi Lahan Kritis				
	05.03.2	2) Reboisasi Areal HPH				
	05.04	d. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi
	05.04.1	1) Pemolaan Pengelolaan DAS				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
8	05.04.2	2) Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi
	05.04.3	3) Teknik Pengelolaan DAS				
	05.04.4	4) Evaluasi Pengelolaan DAS				
	05.05	e Perhutanan Sosial				
	05.05.1	1) Pemolaan				
	05.05.2	2) Pengembangan Hutan Kemasvarakatan				
	05.05.3	3) Pengembangan Hutan Desa				
	05.05.4	4) Pengembangan Hutan Hak dan Kemitraan				
	05.05.5	5) Pengembangan Usaha Perhutanan Sosia				
	05.05.6	6) Hasil Hutan Bukan Kayu/Aneka Usaha Kehutanan (HHBK/AUK)				
8	05.06	f. Pengendalian Perladangan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi
	05.06.1	1) Penentuan Lokasi				
	05.06.2	2) Pemupukan Lokasi				
	05.06.3	3) Pengelolaan Tanah				
	05.6.4	4) Pemindahan Penduduk				
	05.06.5	5) Pembuatan Sarana				
	06	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan				
	06.01	a. Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana,JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
	06.01.1	1) Perencanaan Program Penelitian				
		a) Penyusunan Rencana Anggaran Penelitian dan Pengembangan				
		b) Penyusunan Rencana Kegiatan Penelitian dan Pengembangan				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	06.02	2) Pelaksanaan Penelitian	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana,JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
	06.02.1	a) liin penelitian data penelitian				
	06.02.2	b) Data Mentah Hasil Penelitian				
	06.02.3	c) Hasil Penelitian				
	06.02.4	d) Analisis Hasil Penelitian				
	06.02.5	e) Laporan Hasil Penelitian				
	06.02	b. Monitoring dan Evaluasi Penelitian	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana,JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
	06.02.1	1) Monitoring Penelitian				
	06.02.2	2) Evaluasi Penelitian				
	06.02.3	3) Rekomendasi Penelitian				
	06.03	c. Diseminasi				
	06.03.1	1) Gelar Teknologi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
	06.03.2	2) Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
XV		PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
1	00	KEBIJAKAN BERSIFAT PENGATURAN Kebijakan tentang pendidikan dan kebudayaan meliputi: kurikulum, non formal dan informal, menengah, atas.	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana,JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pembinaan SMA dan Bidang Pembinaan SMK
	00.01	a Pengkajian dan pengusulan kebijakan				
	00.02	b Penyiapan bahan				
	00.03	c Perumusan kebijakan				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
2	00.04	d Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebiijakan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Sekretariat
	00.05	e Penetapan dalam bentuk NSPK				
	00.06	f Perumusan dan penerapan standar				
	00.07	g MoU (<i>Memorandum of Understanding</i>)				
	01	KEBIJAKAN BERSIFAT PENETAPAN				
	01.01	a Pengkajian dan pengusulan penetapan				
	01.02	b Penyiapan bahan				
3	01.03	c Perumusan penetapan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pembinaan SMA dan Bidang Pembinaan SMK
	01.04	d Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan penetapan				
	01.05	e Penetapan dalam bentuk keputusan				
	02	PEMBINAAN PENDIDIKAN				
	02.01	a Pendidikan menengah				
	02.01.1	1) Sekolah menengah atas				
		a) Kurikulum				
		b) Bahan ajar				
		c) Pelatihan				
		d) <i>Block Grant</i>				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		e) Bimbingan teknis/sosialisasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pembinaan SMA dan Bidang Pembinaan SMK
		f) Lomba, sayembara, dan festival	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pembinaan SMA dan Bidang Pembinaan SMK
		g) Bantuan operasional sekolah [BOS]	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pembinaan SMA dan Bidang Pembinaan SMK
		h) Bantuan siswa miskin	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pembinaan SMA dan Bidang Pembinaan SMK
	02.01.2	2) Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK				
		a) Bahan ajar	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pembinaan SMA
		b) Petunjuk teknis	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pembinaan SMA
		b) Block grant	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pembinaan SMA
		c) Sosialisasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pembinaan SMA
		d) Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pembinaan SMA
		e) Kurikulum/bahan pembelajaran	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pembinaan SMA
		f) Alat bantu pembelajaran	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pembinaan SMA
		g) Pendataan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pembinaan SMA
		h) Kelembagaan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pembinaan SMA
		- Unit kesehatan sekolah				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	02.01.3	- Pendidikan jasmani adaptif - Pendidikan inklusi - <i>Block grant</i> - Bimbingan teknis/sosialisasi - Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore 3) Pendidikan dan tenaga pendidik a) Pendataan dan pemetaan b) Pembinaan guru dan tenaga pendidik c) Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik (standar, uji, dan sertifikasi kompetensi) d) Penilaian prestasi kerja (angka kredit) guru, dan pengawas sekolah e) Penghargaan guru dan tenaga kependidikan f) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan g) <i>Block grant</i> h) Bimbingan teknis/sosialisasi	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka	UMUM UMUM UMUM UMUM UMUM UMUM UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Ketenagaan PMPTK Bidang Ketenagaan PMPTK Bidang Ketenagaan PMPTK Bidang Ketenagaan PMPTK Bidang Ketenagaan PMPTK Bidang Ketenagaan PMPTK Bidang Ketenagaan PMPTK
4	03 03.01 03.01.1	KEBUDAYAAN a. Pelestarian cagar budaya dan permuseuman 1) Registrasi nasional a) Pendaftaran dan penetapan b) Pengelolaan data	Terbuka Terbuka	UMUM UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kebudayaan Bidang Kebudayaan
	03.01.2	2) Pelindungan				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		a) Perizinan dan pengamanan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kebudayaan
		b) Pemeliharaan dan pemugaran	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kebudayaan
	03.01.3	3) pengembangan dan Pemanfaatan				
		a) Pengembangan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kebudayaan
		b) Pemanfaatan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kebudayaan
	03.01.4	4) Eksplorasi dan dokumentasi				
		a) Eksplorasi cagar budaya	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kebudayaan
		b) Dokumentasi cagar budaya dan koleksi museum	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kebudayaan
	03.02	b. Pembinaan kesenian dan perfilman				
	03.02.1	1) Pembinaan seni pertunjukan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kebudayaan
		a) Seni pertunjukan tradisional				
		b) Seni pertunjukan nontradisional				
	03.02.2	2) Pembinaan seni rupa	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kebudayaan
		a) Seni rupa murni				
		b) Seni rupa terapan				
	03.02.3	3) Pembinaan literasi dan apresiasi film	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kebudayaan
		a) Literasi				
		b) Apresiasi				
	03.02.4	4) Dokumentasi dan publikasi				
		a) Dokumentasi seni dan film	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kebudayaan

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b) Publikasi seni dan film	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kebudayaan
	03.03	c. Pembinaan tradisi				
	03.03.1	1) Kelembagaan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kebudayaan
		a) Pemberdayaan lembaga				
	03.03.2	b) Hubungan antar lembaga				
		2) Komunitas adat	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kebudayaan
		a) Komunitas adat				
	03.03.3	b) Upacara adat				
		3) Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kebudayaan
		a) Pengetahuan tradisional				
	03.03.4	b) Ekspresi budaya tradisional				
		4) Lingkungan budaya dan pranata sosial	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kebudayaan
		a) Lingkungan budaya				
		b) Pranata sosial				
	03.04	d. Sejarah dan nilai budaya				
	03.04.1	1) Sejarah	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kebudayaan
		a) Penggalian sumber sejarah				
		b) Penulisan sejarah				
	03.04.2	2) Pemetaan nilai	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kebudayaan
		a) Pemetaan				
		b) Klasifikasi				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
5	03.04.3	3) Verifikasi dan perumusan nilai a) Verifikasi nilai b) Perumusan nilai	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kebudayaan
	03.04.4	4) Dokumentasi dan publikasi a) Dokumentasi sejarah dan nilai budaya b) Publikasi sejarah dan nilai budaya	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kebudayaan
	03.05	e. Internalisasi nilai dan diplomasi budaya				
	03.05.1	1) Internalisasi nilai budaya a) Pengemasan nilai budaya b) Penanaman nilai budaya	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kebudayaan
			Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kebudayaan
	03.05.2	2) Kekayaan budaya a) Pencatatan kekayaan budaya b) Penetapan kekayaan budaya	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kebudayaan
	03.05.3	3) Warisan budaya nasional dan dunia a) Warisan budaya benda b) Warisan budaya takbenda	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kebudayaan
	04	KURIKULUM	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pembinaan SMA & Bidang Pembinaan SMK
	04.01	a. Pembinaan kurikulum				
	04.02	b. Hasil evaluasi penyusunan kurikulum				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
6	05	PERBUKUAN				
	05.01	a. Penyusunan standar mutu buku	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kebudayaan
	05.02	b. Pengumpulan naskah	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kebudayaan
	05.03	c. Penilaian mutu buku dan pemilihan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kebudayaan
	05.04	d. Persetujuan dan pengesahan naskah	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kebudayaan
	05.05	e. Penerbitan/pencetakan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kebudayaan
	05.06	f. Master buku/naskah yang dicetak	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kebudayaan
	05.07	g. Distribusi buku	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kebudayaan
	05.08	h. Pengembangan Naskah	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kebudayaan
	05.09	i. Pengkajian buku	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kebudayaan
7	06	PENILAIAN PENDIDIKAN	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Sekretariat
	06.01	a. Penilaian akademik				
	06.02	b. Penilaian non akademik				
	06.03	c. Analisis dan sistem informasi penilaian				
8	07	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA				
	07.01	a. Pengembangan dan perlindungan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Balai Bahasa
	07.01.1	1) Pengkajian a) Bahasa				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
9	07.01.2	b) Sastra 2) Pembakuan dan pelindungan 3) Informasi dan publikasi b. Pembinaan dan pemasyarakatan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Balai Bahasa
	07.01.3	1) Pemasvarakatan a) Penyuluhan b) Bantuan teknis c Pembelajaran	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Balai Bahasa
	07.01.4	1) Proses pembelajaran 2) Pembinaan tenaga kebahasaan dan kesusasteraan d. Peningkatan dan pengendalian	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Balai Bahasa
		1) Peningkatan fungsi dan peran 2) Pengendalian penggunaan bahasa				
	08 08.01	PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN a Pengembangan profesi pendidik	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	LPMP
	08.01.1	1) Pengembangan profesi pendidik a) Pengembangan profesi pendidik non formal, dan informal b) Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah				
	08.01.2	2) Sertifikasi a) Pengembangan profesi pendidik non formal, dan informal b) Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah				
	08.02 08.02.1	b Pengembangan tenaga kependidikan 1) Program a) Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	LPMP

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	08.02.2	b) Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai 2) Evaluasi a) Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik b) Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai				
	08.03	c Pengembangan SDM kebudayaan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	LPMP
	08.03.01	1) Program a) Peningkatan kompetensi b) Sertifikasi				
	08.03.2	2) Evaluasi a) Peningkatan kompetensi a) Sertifikasi				
	08.04	d. Penjaminan mutu pendidikan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	LPMP
	08.04.1	1) Pemetaan mutu a) Penjaminan mutu non formal, dan informal b) Penjaminan mutu pendidikan menengah				
	08.04.2	2) Sistem Informasi a) Penjaminan mutu nonformal, dan informal b) Penjaminan mutu pendidikan menengah				
	08.05	e. Penyusunan materi/SOP/instrumen/panduan/pedoman	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	LPMP
	08.05.1	1) Proposal/TOR/KAK				
	08.06	f. Penyelenggaraan pelatihan/diseminasi/sosialisasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	LPMP
	08.07	g. Penyelenggaraan bimtek/monitoring dan evaluasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	LPMP

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
10	08.08	h. Penyaluran <i>block grant</i> pascabencana	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	LPMP
	08.09	i. Lomba/sayembara/festival/olimpiade pendidikan nasional internasional	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	LPMP
	09	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN				
	09.01	a. Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Sekretariat
	09.01.1	1) Perancangan dan produksi				
	09.01.2	2) penyiaran dan pengendalian				
	09.02	b. Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis multimedia dan <i>web</i>	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Sekretariat
	09.02.1	1) Perancangan dan produksi				
	09.02.2	2) Aplikasi dan Pengendalian				
	09.03	c. Pengembangan jejaring	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Sekretariat
11	09.03.1	1) Pengkajian dan perancangan				
	09.03.2	2) Pemeliharaan dan pengendalian				
	010	DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN				
	010.1	a. Data peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Sekretariat
	010.1.1	1) Validasi dan integrasi data peserta didik				
	010.1.2	2) validasi dan integrasi data peserta pendidik dan tenaga kependidikan				
	010.2	b. Data satuan pendidikan dan proses pembelajaran	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Sekretariat

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
13	010.2.1	1) Validasi dan integrasi dan satuan pendidikan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Sekretariat
	010.2.2	2) Validasi dan integrasi data proses pembelajaran				
	010.3	c. Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik				
	010.3.1	1) Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik anak				
13	010.3.2	2) Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik menengah	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Sekretariat
	011	MONITORING DAN EVALUASI				
XVI	DIKES	KESEHATAN				
1	00	PERUMUSAN KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Bina Upaya Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Bina	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Sekretariat
2	00.01	a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayanan Kesehatan
	00.02	b. Penyiapan bahan				
	00.03	c. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan				
	00.04	d. Pengumpulan dan pengolahan data				
	00.05	e. Penetapan dalam bentuk nspk dan standarisasi				
	01	UPAYA KESEHATAN				
2	01.01	a. Upaya Kesehatan Dasar	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayanan Kesehatan
	01.01.1	1) Pelaksanaan Akreditasi FKTP	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayanan Kesehatan
	01.01.2	2) Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayanan Kesehatan
	01.01.3	3) Pembinaan Manajemen Puskesmas	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayanan Kesehatan

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	01.01.4	4) Pelaksanaan PIS-PK	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayanan Kesehatan
	01.01.5	5) Pelayanan Darah	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayanan Kesehatan
	01.01.6	6) Pelayanan Kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayanan Kesehatan
	01.01.7	7) Puskesmas berprestasi	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayanan Kesehatan
	01.02	b. Upaya Kesehatan Rujukan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayanan Kesehatan
	01.02.1	1) Pelayanan Kesehatan Rujukan a) Rumah sakit Pratama b) Rumah sakit Khusus				
	01.02.2	2) Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi dan Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK)				
	01.02.3	3) Pelayanan Rumah Sakit Privat a) Akses Pelayanan SPGDT Call 119	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayanan Kesehatan
	01.02.4	4) Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain a) Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Rumah Sakit Rujukan Regional b) Pencegahan <i>Froud</i> di Rumah Sakit	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayanan Kesehatan
	01.02.5	5) Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan a) Keselamatan Pasien di Rumah Sakit b) Pelayanan HIV/AIDS c) Pelayanan Tim Reproduksi Berbantu di Rumah Sakit d) Penguatan Rumah Sakit Vertikal sebagai <i>Sister Hospital</i>	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayanan Kesehatan

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	01.02.6	e) Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi (PPDSBK) 6) Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan a) Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan				
	01.03	c. Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayanan Kesehatan
	01.03.1	1) Sarana dan Prasarana Kesehatan a) Prasarana Bangunan Rumah Sakit Kelas B b) Prasarana Ruang Gawat Darurat c) Prasarana Ruang Operasi d) Prasarana Ruang Perawatan Intensif e) Prasarana Ruang Rawat Inap f) Prasarana Ruang Rehabilitasi Medik g) Prasarana Ruang Instalasi Sterilisasi Sentral (CSSD) h) Prasarana Ruang Yang Aman dalam Situasi dalam Situasi Darurat Dan Bencana i) Prasarana Instalasi Penyediaan Air Bersih untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan j) Prasarana Instalasi Pengolahan Air Limbah pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan k) Prasarana Rumah Sakit Keselamatan Jiwa l) Prasarana Rumah Sakit Sistem Instalasi Gas Medik Dan Vakum Medik m) Prasarana Rumah Sakit Sistem Instalasi Tata Udara n) Prasarana Rumah Sakit Sistem Proteksi Kebakaran Aktif	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayanan Kesehatan
	01.03.2	2) Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan a) Kalibrasi BPFFK/LPFFK/UPFK b) Pemeliharaan Peralatan kesehatan Rumah Sakit	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayanan Kesehatan

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	01.03.3	3) Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK) a) ASPAK Rumah Sakit b) ASPAK Dinas Kesehatan Provinsi	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana,JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayanan Kesehatan
	01.04	e. Kesehatan Jiwa				
	01.04.1	1) Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan a) Kegawatdaruratan Psikiatrik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer b) Promosi Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana,JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit
	01.04.2	2) Etikolegal dan Asesmen a) Penanggulangan Penelantaran dan Pemasungan Serta Penanganan Salah Lainnya Terhadap Orang Dengan Penderita Gangguan Jiwa	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana,JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit
	01.04.3	3) Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif, Rokok, dan Alkohol a) Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) b) Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gangguan Penggunaan Alkohol c) Wajib Lapor Pecandu Narkotika d) Pencegahan Masalah Akibat Penggunaan Tembakau e) Etil Rehabilitasi Medis terkait Hukum	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana,JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit
	01.04.4	4) Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
3	02 02.01	a) Psikologi Awal (PFA) Bagi Petugas Siaga Bencana PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN a. Surveilans dan Karantina Kesehatan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit
	02.01.1 02.01.2 02.01.3 02.01.4	1) Kewaspadaan dini, Respon KLB dan wabah 2) Pengendalian penyakit infeksi emerging (PIE) 3) Pelayanan Imunisasi 4) Kesehatan Haji dan mantra lainnya				
	02.02	b. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular Langsung (P2ML)	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit
	02.02.1 02.02.2 02.02.3 02.02.4 02.02.5	1) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB (Tuberkulosis) 2) Pencegahan dan Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual 3) Pengendalian Infeksi Pengendalian Saluran Pernafasan Akut a) <i>Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus</i> (MERS CoV) b) Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) 4) Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan a) Diare b) Tifoid c) Hepatitis 5) Pengendalian Kusta dan Frambusia a) Kusta b) Frambusia c) Aliansi Nasional Eliminasi Kusta dan Frambusia (ANEK)				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	02.03	c. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor & Zoonotik (P2TVZ)	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit
	02.03.1	1) Pencegahan dan Pengendalian Malaria a) Kelambu berinsektisida (LLINs) b) Eliminasi malaria c) Crosschecker mikroskopis malaria				
	02.03.2	2) Pencegahan dan Pengendalian Arbovirolosi a) DBD b) Chikungunya c) Ebola	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana,JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit
	02.03.3	3) Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis a) Penyakit flu burung b) Vaksin Anti Rabies (VAR) baru c) Penyakit Pes d) Penyakit flu baru Hemagglutinin tipe 1 dan Neuraminidase tipe 1 (H.1.N.1)	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana,JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit
	02.03.4	4) Pencegahan dan Pengendalian Filariasis dan Kecacingan a) Filariasis b) Kecacingan c) Schistosomiasis	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana,JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit
	02.04	d. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	02.04.1	1) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah a) Penyakit Jantung b) Penyakit Pembuluh darah c) Penyakit Hipertensi d) Penyakit Stroke	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit
	02.04.2	2) Pencegahan dan Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik a) Penyakit Diabetes Mellitus b) Penyakit gangguan Metabolik c) Penyakit gangguan Tiroid d) Gangguan Obesitas	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit
	02.04.3	3) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kanker	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit
	02.04.4	4) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kronis dan Generatif a) Penyakit Akibat produk tembakau b) Asma, Lupus, Thalassemia	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit
	02.04.5	5) Pencegahan dan Pengendalian Gangguan Indra Fungsional a) Pengendalian Cidera b) Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas c) Penanganan Kesehatan akibat Tindak Kekerasan				
	02.04.6	6) Pengendalian konsumsi rokok				
	02.05	e. Penyehatan Lingkungan				
	02.05.1	1) Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		a) Pengawasan Kualitas Air Minum	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kesmas, Pengendalian Penduduk dan KB
	02.05.2	b) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 2) Penyehatan Udara Tanah dan kawasan sehat	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kesmas, Pengendalian Penduduk dan KB
	02.05.3	a) Higiene sanitasi dan Bangunan Umum b) Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan c) Pengendalian faktor resiko di rumah dan tempat umum d) Pasar Sehat e) Kabupaten/kota sehat f) Kedaruratan kesehatan lingkungan 3) Higiene Sanitasi Pangan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kesmas, Pengendalian Penduduk dan KB
	02.05.4	a) Makanan Jajanan b) Restoran / Rumah Makan c) Jasa Boga d) Depot Air Minum 4) Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kesmas, Pengendalian Penduduk dan KB
	02.06	a) Medis Fasyankes b) Limbah Medis (Free Mercury) c) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) d) Pengamanan Dampak kesehatan radiasi non pengion f. Pengembangan dan Penapisan Teknologi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kesmas, Pengendalian Penduduk dan KB

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
4	02.06.1	1) Pengembangan Teknologi dan Laboratorium a) Laboratorium Pengendali Penyakit b) Laboratorium Kesehatan Lingkungan c) Laboratorium Kesehatan Matra d) Model dan Teknologi Tepat Guna e) Uji kendali mutu dan kalibrasi f) Pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan pada instalasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kesmas, Pengendalian Penduduk dan KB
	02.07	g. Sertifikasi Sanitasi Kesehatan dan Pengujian Kesehatan				
	02.07.1	1) Sertifikat a) Sertifikat Air Bersih b) Sertifikat Penyelenggaraan Perusahaan Fumigasi di Kapal c) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga d) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan e) Rekomendasi hasil uji laboratorium rujukan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kesmas, Pengendalian Penduduk dan KB
	03 03.01	GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK a. Gizi				
	03.01.1	1) Gizi Klinik dan Dietetik a) Pelayanan Gizi di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Instansi b) Tatalaksana Anak Gizi Buruk c) Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Lebih	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kesmas, Pengendalian Penduduk dan KB
	03.01.2	2) Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan a) Makanan Pendamping ASI b) ASI Eksklusif				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	03.01.3	c) Pedoman Gizi Seimbang d) Makanan Bayi dan Anak e) Buffer Stock Makanan Pendamping ASI f) Makanan Tambahan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis dan Balita Gizi Kurang g) Makanan Tambahan Anak Sekolah 3) Kewaspadaan Gizi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kesmas, Pengendalian Penduduk dan KB
	03.02 03.02.1	a) Surveilans Gizi b) Epidemiologi Kasus Gizi Buruk c) Penanganan Bidang Gizi dalam Situasi Bencana d) Jejaring Informasi Pangan dan Gizi b. Kesehatan Ibu 1) Kesehatan Ibu Hamil	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kesmas, Pengendalian Penduduk dan KB
	03.02.2	a) Pelayanan Antenatal Terpadu b) Pelayanan Kelas Ibu Hamil c) Pencegahan Penularan HIV AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA) 2) Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kesmas, Pengendalian Penduduk dan KB
	03.02.3	a) Kemitraan Bidan dan Dukun b) Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) c) Supervisi Fasilitatif 3) Kesehatan Maternal Dengan Pencegahan Komplikasi a) Audit Maternal Perinatal	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kesmas, Pengendalian Penduduk dan KB

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	03.02.4	b) Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)/Pemberdavaan Masvarakat c) Tanda Bahaya pada Kehamilan d) Surveilans Kematian Ibu 4) Keluarga Berencana	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kesmas, Pengendalian Penduduk dan KB
	03.02.5	a) Pelayanan KB Pasca Persalinan b) Pelatihan KB Pasca Persalinan 5) Perlindungan Kesehatan Reproduksi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kesmas, Pengendalian Penduduk dan KB
	03.03	a) Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT) b) Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana (Paket Pelayanan Awal Minimal/PPAM Kespro) c) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan d) Pengarus Utamaan Gender Bidang Kesehatan (PUGBK)				
	03.03.1	c. Kesehatan Anak 1) Kelangsungan Hidup Bayi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kesmas, Pengendalian Penduduk dan KB
	03.03.2	a) Pelayanan Kesehatan Neonatal b) Manajemen Asfeksia c) Manajemen BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) d) Pencegahan Infeksi 2) Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kesmas, Pengendalian Penduduk dan KB

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	03.03.3	a) Pelatihan SDIDTK (Stimulasi Dini Interfensi Deteksi Tumbuh Kembang) b) Rujukan Tumbuh Kembang c) Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Komputer (ICATT) 3) Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kesmas, Pengendalian Penduduk dan KB
	03.03.4	a) Screening Hypothroid Congenital b) Surveillance Kesehatan Anak c) Surveillance Kesehatan Bawaan 4) Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kesmas, Pengendalian Penduduk dan KB
	03.03.5	a) Tempat Penanganan Kesehatan Remaja di Rumah Sakit b) Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja c) Usaha Kesehatan Sekolah 5) Perlindungan Kesehatan Anak	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kesmas, Pengendalian Penduduk dan KB
	03.04 03.04.1	d. Kesehatan Tradisional Alternatif, dan Komplementer 1) Kesehatan Tradisional Keterampilan a) Akupresure b) Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayanan Kesehatan

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	03.04.2	c) Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan di Fasyankes b) Pelayanan Tradisional Keterampilan Lainnya 2) Kesehatan Tradisional Ramuan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayanan Kesehatan
	03.04.3	a) Peningkatan Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) b) Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) c) Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional d) Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan di Fasyankes 3) Kesehatan Alternatif dan Komplementer	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayanan Kesehatan
	03.04.4	a) Akupunktur b) Obat Herbal / Obat Tradisional c) Integrasi Yankestrad d) Pelayanan Alternatif Komplementer lainnya 4) Penapisan dan Kemitraan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayanan Kesehatan
	03.05 03.05.1	a) Sentra Penerapan dan Pengembangan Pengobatan Tradisional (SP3T) b) Pengobat Tradisional (Lokal) c) Asosiasi Pengobat Tradisional e. Kesehatan Kerja dan Olahraga 1) Pelayanan Kesehatan Kerja	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kesmas, Pengendalian Penduduk dan KB
		a) Penyakit Akibat Kerja b) Pemeriksaan Kesehatan Pekerja c) Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	03.05.2	2) Kapasitas Kerja a) Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif b) Kapasitas Kesehatan Kerja c) TP ASI	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kesmas, Pengendalian Penduduk dan KB
	03.05.3	3) Lingkungan Kerja a) K3 Rumah Sakit b) K3 Puskesmas	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kesmas, Pengendalian Penduduk dan KB
	03.05.4	4) Kemitraan Kesehatan Kerja a) Pengembangan Jabfung Pembimbing Kesehatan Kerja b) Kesehatan Nelayan c) Integrasi Pos UKK	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kesmas, Pengendalian Penduduk dan KB
	03.05.5	5) Kesehatan Perkotaan a) Kawasan Kumuh dan Miskin Perkotaan b) Forum Kota	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kesmas, Pengendalian Penduduk dan KB
	03.05.6	6) Kesehatan Olahraga a) Kebugaran Jasmani bagi Karyawan/Pekerja b) Kebugaran Jasmani bagi Calon Jemaah Haji c) Kebugaran Jasmani bagi Usia Sekolah	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kesmas, Pengendalian Penduduk dan KB
5	04 04.01	KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN a. Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Penvediaan,				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	04.01.1	1) Pengadaan Obat a) Pengadaan Vaksin Rabies b) Obat Pelayanan Kesehatan Dasar, Kabupaten Kota dan Nasional c) Obat Program Kesehatan Anak d) Obat Program Kesehatan Ibu e) Obat Program Gizi f) Obat Anti Tuberkulosis	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Sumber Daya Kesehatan
	04.01.2	2) Perbekalan Kesehatan a) Gudang Farmasi b) Kelengkapan Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan c) Pemusnahan Obat, Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan d) Pengadaan Reagen Screening Darah e) Obat <i>Buffer Stock</i> f) Hasil <i>Stock Opname</i> Obat	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Sumber Daya Kesehatan
	04.02	b. Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan				
	04.02.1	1) Produsen dan Distributor Alat Kesehatan dan Obat a) Pedagang Besar Farmasi b) Penyalur Alat Kesehatan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Sumber Daya Kesehatan
	04.02.2	2) Produk Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) a) Perusahaan Rumah Tangga PKRT				
	04.03	c. Kefarmasian (Standarisasi, klinis, komunitas dan Obat Tradisional)				
	04.03.1	1) Penggunaan Obat Rasional a) Obat Rasional b) Informasi Obat	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Sumber Daya Kesehatan

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
6	04.04	c) Kefarmasian untuk Terapi Antibiotik d. Produksi dan Distribusi Kefarmasian	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Sumber Daya Kesehatan
	04.04.1	1) Obat Tradisional a) Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) b) Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT) c) Usaha Jamu Gendong (UJG) d) Usaha Jamu Racik (UJR)				
	04.04.2	2) Kosmetik dan Makanan a) Keamanan Pangan b) Makanan Jajanan Anak Sekolah				
	04.04.3	3) Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi dan Sediaan Farmasi Khusus a) Narkotika dan Psikotropika				
	05	SURAT KETERANGAN, SERTIFIKASI DAN PERIJINAN	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Sumber Daya Kesehatan
	05.01	a. Sertifikasi dan Perijinan				
	05.01.1	1) Perijinan Dan Pengawasan Alat Kesehatan				
	05.01.2	2) Perijinan Penyalur Alat Kesehatan				
	06	PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayanan Kesehatan
	06.01	a. Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan				
7	06.01.1	1) Pencegahan dan Mitigasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayanan Kesehatan
	06.01.2	2) Kesiapsiagaan				
	06.02	b. Tanggap Darurat dan Pemulihan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayanan Kesehatan
	06.02.1	1) Tanggap Darurat				
	06.02.2	2) Pemulihan				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
8	06.03	c. Pemantauan dan Informasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayanan Kesehatan
	06.03.1	1) Pemantauan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayanan Kesehatan
	06.03.2	2) Informasi				
9	07	d. Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam bidang Pengendalian Penyakit dan Pencegahan Lingkungan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayanan Kesehatan
	07.01	PEBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN				
10	08	INTELIGENSIA KESEHATAN	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayanan Kesehatan
	08.01	a. Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligensia Petugas				
	08.01.1	1) Inteligensia Anak				
11	08.01.2	2) Inteligensia Remaja, Dewasa, dan Lanjut Usia	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pelayanan Kesehatan
	09	KESEHATAN HAJI				
	09.01	a. Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji				
	09.01.1	1) Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji				
	09.01.2	2) Pelayanan Kesehatan jamaah Haji kab/kota				
11	09.01.3	3) Rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI)				
	010	PROMOSI KESEHATAN	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kesmas, Pengendalian Penduduk dan KB
	010.1	a Sarana Promosi Kesehatan				
	010.1.1	1) Poster				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	010.1.2 010.1.3 010.1.4 010.1.5 010.1.6 010.1.7	2) Leaflet 3) Lembar Balik 4) Selebaran 5) Pameran 6) Iklan Layanan Masyarakat 7) Radio Spot				
	010.2	b. Pembinaan Advokasi dan Kemitraan serta Pemberdayaan Peran	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kesmas, Pengendalian Penduduk dan KB
	010.2.1 010.2.2 010.2.3 010.2.4 010.2.5 010.2.6 010.2.7 010.2.8	1) Saka Bhakti Husada 2) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 3) Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Kesehatan 4) Kawasan Tanpa Rokok 5) Kerjasama dengan Swasta dibidang Kesehatan 6) Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan 7) Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor di Bidang Kesehatan 8) Peran Serta Kader PKK dan Dasawisma dalam Mendukung Kesehatan Ibu dan Anak				
	010.3	c. Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kesmas, Pengendalian Penduduk dan KB
	010.3.1 010.3.2	1) Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan 2) Kampanye Promosi Kesehatan				
	010.4	d. Hari Kesehatan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kesmas, Pengendalian Penduduk dan KB
	010.4.1	1) Hari Kesehatan Nasional				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
13	010.4.2 010.4.3 010.4.4 011	2) Hari Kesehatan Dunia 4) Hari tanpa Tembakau se-Dunia 5) Hari-hari Besar Kesehatan DATA DAN INFORMASI	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana,JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Kesmas, Pengendalian Penduduk dan KB
	011.01 011.02 011.03	a. Pengumpulan dan Pengolahan Data Kesehatan b. Analisa data kesehatan c. Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data Kesehatan 1) Pengembangan Sistem Informasi 2) Bank Data				
XVII		PEMUDA DAN OLAHRAGA				
1	00	Kebijakan Pemuda dan Olah Raga meliputi kebijakan dibidang Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan pemuda, Pembudayaan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana,JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pemuda dan Olahraga
	00.01 00.02 00.03 00.04 00.05	a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan b. Penyiapan kebijakan c. Perumusan dan penyusunan bahan d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan e. Penetapan dalam bentuk NSPK				
2	01 01.01	Pemberdayaan Pemuda a. Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pemuda dan Olahraga
	01.01.1 01.01.2	1) Penelusuran (Duta Kepemudaan) a) Potensi Lokal (Provinsi) b) Potensi Nasional c) Potensi Internasional 2) Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan) a) Potensi Lokal (Provinsi)				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	01.01.3	b) Potensi Nasional c) Potensi Internasional 3) Pengembangan a) Potensi Nasional b) Potensi Internasional (Pertukaran Pemuda)				
	01.02	b. Peningkatan Wawasan Pemuda	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pemuda dan Olahraga
	01.02.1	1) Wawasan Kebangsaan a) Program c) Evaluasi				
	01.02.2	2) Wawasan Lingkungan a) Program b) Evaluasi				
	01.02.3	3) Wawasan Sosial dan Hukum a) Program b) Evaluasi				
	01.03	c. Peningkatan Kapasitas Pemuda	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pemuda dan Olahraga
	01.03.1	1) Kapasitas Imam dan Taqwa a) Program b) Evaluasi				
	01.03.2	2) Kapasitas IPTEK a) Program b) Evaluasi				
	01.03.3	3 Pemanfaatan IPTEK a) Program b) Evaluasi				
	01.04	d Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pemuda dan Olahraga
	01.04.1	1) Pengkajian a) Program				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
3	01.04.2	b) Evaluasi 2) Pengembangan a) Program	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pemuda dan Olahraga
	01.04.3	b) Evaluasi 3) Pendayagunaan (fasilitasi) a) Program b) Evaluasi				
	02	Pengembangan Pemuda				
	02.01	a. Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda				
	02.01.1	1) Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan a) Program b) Evaluasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pemuda dan Olahraga
	02.01.2	2) Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawanan. Pengembangan kebedulian. pendampingan a) Program b) Evaluasi				
	02.02	b. Kewirausahaan				
	02.02.1	1) Kelembagaan a) Program b) Evaluasi				
	02.02.2	2) Pengaderan a) Program b) Evaluasi				
	02.02.3	3) Perintisan a) Program b) Evaluasi				
	02.03	c. Organisasi Kepemudaan Dan Pengawasan Kepramukaan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pemuda dan Olahraga

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	02.03.1	1) Organisasi Kepemudaan a) Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan Sumberdava - Program - Evaluasi b) Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan : Kelembagaan dan Sumberdava - Program - Evaluasi c) Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdava - Program - Evaluasi				
	02.03.2	2) Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdava a) Pengkajian b) Pengembangan				
	02.04	e. Kemitraan dan Penghargaan Pemuda	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pemuda dan Olahraga
	02.04.1	1) Kemitraan a) Lintas Sektoral b) Daerah c) Luar Negeri				
	02.04.2	2) Penghargaan Pemuda a) Pengembangan Peghargaan Kepemudaan b) Pengembangan Promosi Kepemudaan				
4	03 03.01	Pembudayaan Olahraga a. Pengelolaan Olahraga Pendidikan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	PPLP

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	03.01.1	1) Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah a) Pengembangan b) Evaluasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pemuda dan Olahraga
	03.01.2	2) Olahraga Pendidikan Tinggi a) Pengembangan b) Evaluasi				
	03.01.3	3) Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal a) Pengembangan b) Evaluasi				
	03.02	b. Pengelolaan Olahraga Rekreasi				
	03.02.1	1) Olahraga Massal a) Pengembangan b) Evaluasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	PPLP
	03.02.2	2) Olahraga Tradisional a) Pengembangan b) Evaluasi				
	03.02.3	3) Olahraga Petualangan, Tantangan dan wisata a) Pengembangan b) Evaluasi				
	03.03	c. Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga				
	03.03.1	1) Sekolah Khusus Olahraga a) Provinsi - Pengembangan - Evaluasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	PPLP
	03.04	d. Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus				
	03.04.1	1) Olahraga Tradisional a) Lokal				
	03.04.2	2) Layanan Khusus				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
5	03.05	a) Olahraga Usia Dini dan Lansia b) Olahraga Penyandang Cacat e. Kemitraan dan Penghargaan Olahraga	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pemuda dan Olahraga
	03.05.1	1) Kemitraan Keolahragaan a) Lintas Sektoral b) Daerah				
	03.05.2	2) Penghargaan Olahraga a) Penelusuran b) Penyelenggaraan				
	04 04.01	Peningkatan Prestasi Olahraga a. Pebibitan dan IPTEK Olahraga	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	PPLP
	04.01.1	1) Pembibitan Olahraga a) Pemandu Bakat - Penelusuran Bakat - Penelaahan Bakat b) Pengembangan Olahragawan Berbakat - Program - Evaluasi c) Kompetisi - Nasional				
	04.02	b. Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pemuda dan Olahraga
	04.02.1	1) Tenaga Keolahragaan a) Pengembangan Tenaga Pendidik dan Pendukung				
	04.02.2	2) Organisasi Keolahragaan a) Pendidikan dan Rekreasi b) Olahraga Prestasi - Kelembagaan				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	04.03	c - Sumberdaya Olahraga Prestasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pemuda dan Olahraga
	04.03.1	1) Daerah a) Pengembangan b) Pekan dan Kejuaraan Olahraga				
	04.03.2	2) Nasional a) Pengembangan b) Pekan dan Kejuaraan Olahraga				
	04.04	d. Standardisasi dan infrastruktur Olahraga	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Pemuda dan Olahraga
	04.04.1	1) Standardisasi Keolahragaan a) Olahraga Prestasi b) Olahraga Pendidikan dan Rekreasi				
	04.04.2	2) Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan a) Olahraga Prestasi b) Olahraga Pendidikan dan Rekreasi				
	04.04.3	3) Infrastruktur Olahraga a) Prasarana dan sarana Olahraga Pendidikan b) Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi c) Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi				
XVIII		KETENAGAKERJAAN				
1	00	PERUMUSAN KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Perencanaan Tenaga Kerja, Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas. Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja. Pembinaan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Transmigrasi dan tenaga Kerja
	00.01	a Pengkajian dan pengusulan kebijakan				
	00.02	b Penyiapan bahan				
	00.03	c Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan				
	00.04	d Pengumpulan dan pengolahan data				
	00.05	e Penetapan dalam bentuk pengaturan berupa norma, standar,				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
2	01 01.01	PERENCANAAN TENAGA KERJA a Perencanaan Tenaga Kerja Makro	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Transmigrasi dan tenaga Kerja
	01.01.1	1) Perencanaan Tenaga Kerja Daerah a) Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah b) Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah c) Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah				
	01.02	b. Perencanaan Tenaga Kerja Mikro	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Transmigrasi dan tenaga Kerja
	02.02.1	1) Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah a) Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah b) Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah c) Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah				
	02.02.1	2 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta a) Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Swasta b) Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta c) Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta				
3	02 02.01	PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS a. Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan				
	02.01.1	1) Pengembangan Standarisasi Kompetensi a) Penerapan Standar Kompetensi b) Bimbingan Penerapan Standar Kompetensi c) Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Transmigrasi dan tenaga Kerja

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	02.01.2	(1) Program Pelatihan Ketenagakerjaan (2) Penyusunan Materi Pelatihan Ketenagakerjaan d) Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan (1) Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan (2) Penyusunan Materi Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan e) Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian (1) Program Pelatihan Ketransmigrasian (2) Penyusunan Materi Pelatihan Ketransmigrasian 2) Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja a) Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan (1) Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (2) Pengembangan Sistem Informasi Kelembagaan b) Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan (1) Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan (2) Bimbingan Pengelolaan Sarana dan Fasilitas c) Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan (1) Standar Mutu Lembaga Pelatihan (2) Bimbingan Penerapan Standar Mutu d) Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga (1) Sistem Pendanaan Pelatihan (2) Kerjasama Antar Lembaga	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Transmigrasi dan tenaga Kerja
	02.01.3	3) Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan a) Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah (1) Peningkatan Kompetensi Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah (2) Pengembangan Karir Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Transmigrasi dan tenaga Kerja

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	02.01.4	b) Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta (1) Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta (2) Pengembangan Karir Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta c) Tenaga Pelatihan (1) Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelatihan (2) Pengembangan Karir Tenaga Pelatihan d) Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan (1) Registrasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan (2) Penyebaran Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan 4) Bina Pemagangan a) Pemagangan Dalam Negeri (1) Program Pemagangan Dalam Negeri (2) Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Dalam Negeri b) Pemagangan Luar Negeri (1) Program Pemagangan Luar Negeri (2) Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Luar Negeri c) Perizinan dan Advokasi Pemagangan (1) Perizinan dan Rekomendasi (2) Advokasi dan Perlindungan d) Promosi dan Jenjang Pemagangan (1) Promosi dan Sistem Informasi Pemagangan (2) Pemagangan Jejaring Pemagangan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Transmigrasi dan tenaga Kerja
	02.01.5	5) Produktivitas dan Kewirausahaan a) Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan (1) Promisi Produktivitas dan Kewirausahaan	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Transmigrasi dan tenaga Kerja

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
4	03 03.01	(2) Kerjasama Peningkatan Produktivitas dan Kewirausahaan b) Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas (1) Sistem dan Metode Produktivitas (2) Alat dan Teknik Peningkatan Produktivitas c) Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas (1) Pengukuran Produktivitas (2) Kajian Produktivitas d) Pengembangan Kewirausahaan (1) Pelatihan Manajemen Kewirausahaan (2) Bimbingan Konsultasi PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA a. Pengembangan Pasar Kerja	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Transmigrasi dan tenaga Kerja
	03.01.1	1) Informasi Pasar Kerja a) Informasi Pasar Kerja Dalam Negeri b) Informasi Pasar Kerja Luar Negeri				
	03.01.2	2) Analisis Pasar Kerja a) Analisis Pasar Kerja Dalam Negeri b) Analisis Pasar Kerja Luar Negeri				
	03.01.3	3) Bursa Kerja a) Bursa Kerja Dalam Negeri b) Bursa Kerja Luar Negeri				
	03.01.4	4) Analisis Jabatan a) Analisis dan Informasi Jabatan b) Pengembangan Sistem Analisis Jabatan				
	03.02	b. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Transmigrasi dan tenaga Kerja
	03.02.1	1) Antar Kerja				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	03.02.2	a) Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) / Antar Keria Lokal (AKL) b) Kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja 2) Penempatan Tenaga Kerja Khusus a) Penempatan tenaga kerja khusus muda dan wanita b) Penempatan tenaga kerja khusus penyandang cacat dan lansia	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Transmigrasi dan tenaga Keria
	03.02.3	3) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan a) Penyuluhan Jabatan b) Bimbingan Jabatan				
	03.02.4	4) Pemberdayaan Pengantar Kerja a) Pengembangan Kompetensi Pengantar Kerja b) Kerjasama antar Lembaga				
	03.03	c. Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri				
	03.03.1	1) Kelembagaan Penempatan a) Perizinan Kelembagaan b) Evaluasi Kinerja	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Transmigrasi dan tenaga Keria
	03.03.2	2) Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) a) Penyiapan dan Dokumen Penempatan TKI b) Fasilitasi Penyediaan TKI				
	03.03.3	3) Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia a) Advokasi dan Kepulangan b) Sarana dan Perlindungan				
	03.04	d. Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal				
	03.04.1	1) Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal a) Tenaga Kerja Mandiri b) Tenaga Kerja Sektor Informal				
	03.04.2	2) Pengembangan Padat Karya a) Padat Karya Perdesaan				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	03.04.3	b) Padat Karya Perkotaan 3) Terapan Teknologi Tepat Guna a) Pengembangan Teknologi Tepat Guna b) Penyebarluasan Teknologi Tepat Guna				
	03.04.4	4) Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga a) Pemberdayaan Pendampingan b) Kerjasama Antar Lembaga				
	03.05	e. Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Transmigrasi dan tenaga Keria
	03.05.1	1) Analisis dan Perizinan Sektor Industri a) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri b)Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri				
	03.05.2	2) Analisis dan Perizinan Sektor Jasa a) Rencana Pembangunan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa b) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa				
	03.05.3	3) Pengendalian dan Kerjasama Kelembagaan a) Pengendalian b) Kerjasama Kelembagaan				
	03.06	f. Standardisasi Profesi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Transmigrasi dan tenaga Keria
	03.06.1	1) Sistem Informasi dan Registrasi a) Dokumen yang berhubungan dengan sistem informasi dan registrasi b) Dokumen yang berhubungan dengan Sertifikasi kompetensi keria				
	03.06.2	2) Pembakuan Akreditasi a) Dokumen yang berhubungan dengan kompetensi dan akreditasi kelembagaan sertifikasi b) Dokumen yang berhubungan dengan penyelenggaraan konvensi dan persidangan				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
5	04 04.01	PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA a. Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Transmigrasi dan tenaga Kerja
	04.01.1	1) Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama a) Peraturan Perusahaan b) Perjanjian Kerja Bersama				
	04.01.2	2) Perjanjian Kerja				
	04.01.3	3) Kesejahteraan Pekerja a) Program Kesejahteraan b) Fasilitas Kesejahteraan				
	04.01.4	4 Analisis Diskriminasi Syarat Kerja a) Penanggulangan Diskriminasi Syarat Kerja b) Evaluasi Diskriminasi Syarat Kerja				
	04.02	b. Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Transmigrasi dan tenaga Kerja
	04.02.1	1) Organisasi Pekerja dan Pengusaha a) Organisasi Pekerja b) Organisasi Pengusaha				
	04.02.2	2) Kelembagaan Hubungan Industrial a) Lembaga Kerjasama BIPARTIT b) Lembaga Kerjasama TRIPARTIT				
	04.02.3	3) Pemasarakatan Hubungan Industrial a) Penyiapan Masyarakat Materi Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial b) Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial				
	04.03	c. Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Transmigrasi dan tenaga Kerja
	04.03.1	1) Pengupahan a) Penerapan Standar Pengupahan b) Pengurusan Pengupahan				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
6	04.03.2	3) Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja a) Pengurusan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja b) Kepesertaan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Transmigrasi dan tenaga Kerja
	04.04	d Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial				
	04.04.1	1) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial a) Pencegahan Dini b) Penanganan Mogok dan Penutupan Perusahaan				
	04.04.2	2) Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial a) Pengurusan Perselisihan Hubungan Industrial b) Evaluasi dan Pelaporan				
	04.04.3	3) Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial a) Fungsionalisasi Perantara dan Legitimasi Mediator, Konsiliator, dan Arbiter Hubungan Industrial b) Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan di Luar Peradilan				
	05	PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Transmigrasi dan tenaga Kerja
	05.01	a. Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				
	05.01.1	1) Pengawasan Norma Kerja a) Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat b) Pengawasan Norma Pengupahan				
	05.01.2	2) Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat a) Pengawasan Norma Hubungan Kerja b) Pengawasan Norma Perlindungan Berserikat				
	05.01.3	3) Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	05.02	a) Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dalam Negeri b) Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri c) Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek b Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Transmigrasi dan tenaga Kerja
	05.02.1	1) Pengawasan Norma Kerja Perempuan a) Pengawasan Norma Penghapusan Diskriminasi b) Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan				
	05.02.2	2) Pengawasan Norma Kerja Anak a) Pengawasan Norma Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak b) Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Anak				
	05.02.3	3) Kerjasama Lintas Sektor a) Kerjasama Lintas Sektor Tenaga Kerja Perempuan b) Kerjasama Lintas Sektor Tenaga Kerja Anak				
	05.02.4	4) Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak a) Advokasi Tenaga Kerja Perempuan b) Advokasi Tenaga Kerja Anak				
	05.03	c Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Transmigrasi dan tenaga Kerja
	05.03.1	1) Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan a) Pengawasan Norma Mekanik b) Pengawasan Norma Pesawat Uap dan Bejana Tekan				
	05.03.2	2) Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran a) Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan b) Pengawasan Norma Listrik dan Penanggulangan Kebakaran				
	05.03.3	3) Pengawasan Norma Kesehatan Kerja a) Pengawasan Norma Pelayanan Kesehatan Kerja				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	05.03.4	b) Pengawasan Norma Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja 4) Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya a) Pengawasan Norma Lingkungan Kerja b) Pengawasan Norma Bahan Berbahaya				
	05.03.5	5) Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3 a) Pengawasan Norma Kelembagaan dan Keahlian K3 b) Pengawasan Norma Sistem Manajemen K3				
	05.04	d. Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Transmigrasi dan tenaga Kerja
	05.05	e. Bina Penegakan Hukum	Terbatas	JPT,Administrator,Pengawas Pelaksana.JFA	Mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Transmigrasi dan tenaga Kerja
	05.05.1	1) Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan a) Teknis Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan b) Penindakan Norma Ketenagakerjaan				
	05.05.2	2) Penyidikan Norma Ketenagakerjaan a) Teknis Penyidikan Norma Ketenagakerjaan b) Administrasi Penyidikan Norma Ketenagakerjaan				
	05.05.3	3) Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil a) Pemberdayaan PPNS b) Sarana dan Prasarana PPNS				
	05.05.4	4) Kerjasama Penegakan Hukum a) Kerjasama Lembaga Penegakan Hukum b) Kerjasama Pemeriksaan dan Penyidikan				
7	06 06.01	KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA a. Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Transmigrasi dan tenaga Kerja
	06.01.1	1) Pengkajian K3 a) Analisis dan Standardisasi bidang K3				

NO.	KLASIFI KASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFI KASI KEAMAN AN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	06.01.2 06.02	b) Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K3 c) Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3 2) Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3 b. Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Terbuka	UMUM	Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas OPD	Bidang Transmigrasi dan tenaga Kerja
	06.02.1	1) SDM K3 a) Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 b) Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3				
	06.02.2	2) Kompetensi K3 a) Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 b) Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 c) Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 d) Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3				

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE